



# ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIK DI BIDANG PENDIDIKAN (STUDY KASUS: KEBIJAKAN LUAR NEGERI BEASISWA DI CHIBA UNIVERSITY)

## SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mengikuti Ujian Oral  
Comprehensif Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH

**TENGKU YULMIDA**  
NIM. 11575201535

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN  
SIK DI BIDANG PENDIDIKAN (STUDY KASUS: KEBIJAKAN  
LUAR NEGERI BEASISWA DI CHIBA UNIVERSITY)**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**TENGKU YULMIDA**

**11575201535**

**PROGRAM S1**

**JURUSAN ADMINISTRASI NEGARA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**PEKANBARU**

**2019**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

NAMA : TENGKU YULMIDA  
 NIM : 11575201535  
 FAKULTAS /JURUSAN : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Administrasi Negara  
 JUDUL : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN SIAK DI BIDANG PENDIDIKAN (STUDY  
 KASUS: KEBIJAKAN LUAR NEGERI BEASISWA DI  
 CHIBA UNIVERSITY)

DISETUJUI OLEH :

DOSEN PEMBIMBING

Irdavanti, S.IP, MA  
 NIK. 130-411 030

MENGETAHUI:

DEKAN

Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
 NIP. 19620512 198903 1 003

KETUA JURUSAN

Administrasi Negara

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

UIN SUSKA RIAU




**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**NAMA** : TENGKU YULMIDA  
**NIM** : 11575201535  
**JURUSAN** : ADMINISTRASI NEGARA  
**FAKULTAS** : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
**JUDUL SKRIPSI** : ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH  
 KABUPATEN SIAK DIBIDANG PENDIDIKAN  
 (STUDY KASUS: KEBIJAKAN LUAR NEGERI  
 BEASISWA DI CHIBA UNIVERSITY)  
**HARI/TANGGAL** : JUM'AT, 20-12-2019

**PANITIA PENGUJI****KETUA**

  
Dr. Kamaruddin, S.Sos, M.Si  
 NIP. 19790101 200710 1 003

**PENGUJI I**

  
Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si  
 NIK.130 712 074

**PENGUJI II**

  
Virna Museliza, SE, M.Si  
 NIK.130712 073

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**ANALISIS KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK  
DI BIDANG PENDIDIKAN (STUDY KASUS: KEBIJAKAN LUAR  
NEGERI BEASISWA DI CHIBA UNIVERSITY)**

Oleh:

**TENGKU YULMIDA**  
**NIM. 11575201535**

*Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University). Dan untuk mengetahui kendala dalam Mengimplementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University).*

*Teori yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Teori Implementasi Kebijakan oleh George Edward III. Adapun metode analisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah Metode Kualitatif dengan analisis Deskriptif.*

*Adapun hasil yang dapat penulis sampaikan Dalam penelitian Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University) dapat dinyatakan bahwa Implementasi kebijakan yang dilkauan oleh Pemerintah Kabupaten Siak sudah terlaksana, namun ada faktor-faktor eksternal terikat yang menyebabkan kebijakan ini kurang berjalan baik.*

**Kata kunci:** *Implementasi, Kerjasama Luar Negeri, Pendidikan, Pemerintah Daerah*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.*

*Alhamdulillahirrabbi'l'alamiin*, puji dan syukur sama-sama kita haturkan kepada Sang Khaliq, karena berkat Kuasa dan *Rahmah*-Nya skripsi ini dapat selesai dengan baik. Shalawat serta salam tetap kita ucapkan kepada *uswatun hasanah*, yang dicintai oleh kawan dan dihormati oleh lawan, yakni Baginda Muhammad SAW.

Penulisan skripsi dengan judul “**Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University)**” ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar strata (S-1) prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan banyak pihak, baik berupa dukungan materil, jasa terutama doa. Pada kesempatan kali ini Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sedikit banyaknya yang telah berpengaruh terhadap skripsi ini, khususnya kepada :

Kedua orangtua, yang tidak hanya bantuan doa dan materil, namun ikut menemani dalam kegiatan penelitian. Tak lupa bimbingan, arahan, kasih sayang, perhatian yang mana semua aspek afeksi sangat berpengaruh secara psikis. Semua yang diberikan sangat berkontribusi banyak dalam penyelesaian skripsi ini. Juga saudara-saudara yang memberikan semangat dan menjadi alasan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S. Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Muh Said, HM, M. Ag., MM., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Bapak Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si., selaku Ketua Jurusan prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Beliau telah banyak membantu dalam kendala penyusunan skripsi ini. Semoga prodi Ilmu Administrasi Negara menjadi prodi yang terbaik di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

5. Ibu Irdyanti, S. IP, MA., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberi ilmu, serta arahan yang sangat baik dalam proses penyusunan skripsi ini, serta yang paling sabar dalam membantu penulis selama proses bimbingan Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu.

Ibu Ratna Dewi, S. Sos, M. Si selaku Dosen Penasehat Akademik yang memberikan arahan dan motivasi sejak awal perkuliahan. Semoga Ibu dan keluarga sehat selalu.

Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama pada prodi Ilmu Administrasi Negara atas seluruh ilmu dan arahan yang diberikan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak yang telah bersedia untuk memberikan data-data dan informasi yang





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimuat dalam skripsi ini. Terutama Bapak Jon Kenedi, S.A.P yang sangat baik dan paling banyak membantu penulis dalam meluangkan waktu dan memberikan data dalam penelitian ini, bapak Muhammad Faizal Harahap, ST., Pak H. M Agung Apandi, S.STP, M.Si., bapak Dr. Husnul Kausarian, M.Sc, pak Ichwan Zulfitra, SE., M.Si., yang telah banyak membantu penulis dalam mencari data dan telah bersedia menjadi key Informan penulis.

Kepada para sahabat dan teman-teman yang memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Baik dukungan, doa, bahkan menjadi *reviewer* dadakan. Terimakasih semuanya, semoga di masa yang akan datang kita akan berkumpul dengan impian yang berhasil kita raih.

10. Tim *Blok N-14* yang acap kali ada di saat yang lain tidak. Yang mau berkorban atas nama “kawan”, yang menasehati layaknya “sahabat”, yang merangkul layaknya “saudara”. Semoga *ukhuwah* kita sampai ke *Jannah*.
11. Serta semua pihak yang terlibat namun tak tertulis di sini. Jasa kalian akan tetap dikenang, terima kasih.

**Pekanbaru, 27 November 2019**

**Penulis,**

**UIN SUSKA RIAU**

**TENGKU YULMIDA**  
**11575201535**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Tujuan Penelitian .....	8
1.4 Manfaat Penelitian .....	9
1.5 Sistematika Penulisan .....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>12</b>
2.1 Pengertian Kebijakan .....	10
2.1.1 Kebijakan Publik .....	14
2.1.2 Tujuan Kebijakan .....	17
2.1.3 Tahap-tahap Kebijakan Publik .....	17
2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik .....	19
2.1.5 Konsep Implementasi .....	23
2.1.6 Landasan Implementasi Kebijakan.....	24
2.1.7 Evaluasi Kebijakan Publik .....	30
2.2 Kerjasama Luar Negeri .....	31
2.2.1 Pengertian Kerjasama Luar Negeri .....	31
2.2.2 Perjanjian Internasional sebagai Instrumen Hukum Kerjasama Internasional .....	33
2.2.3 Definisi dan Ruang Lingkup .....	33
2.2.4. Proses Pembentukan Perjanjian Internasional.....	35
2.2.5 Pengesahan Perjanjian Internasional .....	36

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.2.6	Pemberlakuan Perjanjian Internasional secara nasional.....	41
2.2.7	Tujuan Kerjasama Luar Negeri .....	43
2.2.8	Syarat-syarat Kerjasama Luar Negeri .....	44
2.3	Pemerintah Daerah.....	45
2.3.1	Pengertian Pemerintah Daerah .....	45
2.3.2	Daerah dan Kewenangan Hubungan Luar Negeri .....	47
2.3.3	Hukum Indonesia Terkait Kerjasama Kota/Provinsi Kembar .....	49
2.3.4	Aspek Hukum Internasional dalam Pelaksanaan Kerjasama Kota/Provinsi Kembar .....	52
2.4	Pendidikan .....	59
2.4.1	Pengertian Pendidikan .....	59
2.5	Beasiswa .....	60
2.5.1	Pengertian Beasiswa.....	60
2.6	Penelitian Terdahulu .....	61
2.7	Definisi Konsep .....	62
2.8	Indikator Penelitian.....	64
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>67</b>
3.1	Jenis Penelitian .....	67
3.2	Lokasi dan Waktu Penelitian .....	67
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	67
3.4	Teknik Pengumpulan Data.....	68
3.5	Informasi Peneliti.....	70
3.6	Metode Analisa Data .....	72
<b>BAB IV</b>	<b>GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN .....</b>	<b>73</b>
4.1	Sejarah Singkat Kabupaten Siak.....	73
4.1.1	Peta Kabupaten Siak .....	73
4.2	Visi dan Misi.....	73
4.1.2	Visi Kabupaten Siak.....	78
4.1.3	Misi Kabupaten Siak .....	76



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.3	Sejarah Singkat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Siak .....	79
4.3.1	Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Siak .....	80
4.3.2	Uraian Tugas dan Wewenang Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Siak.....	81
4.4	Tujuan dan Sasaran.....	94
4.5	Strategi dan Kebijakan.....	95
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>		
5.1	Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University).....	96
5.1.1	Komunikasi .....	97
5.1.2	Sumberdaya .....	110
5.1.3	Disposisi atau sikap pelaksana.....	115
5.1.4	Struktur Birokrasi .....	116
5.2	Faktor-faktor Penghambat Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University) .....	118
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>		<b>121</b>
6.1	Kesimpulan .....	121
6.2	Saran .....	122

### DAFTAR PUSTAKA

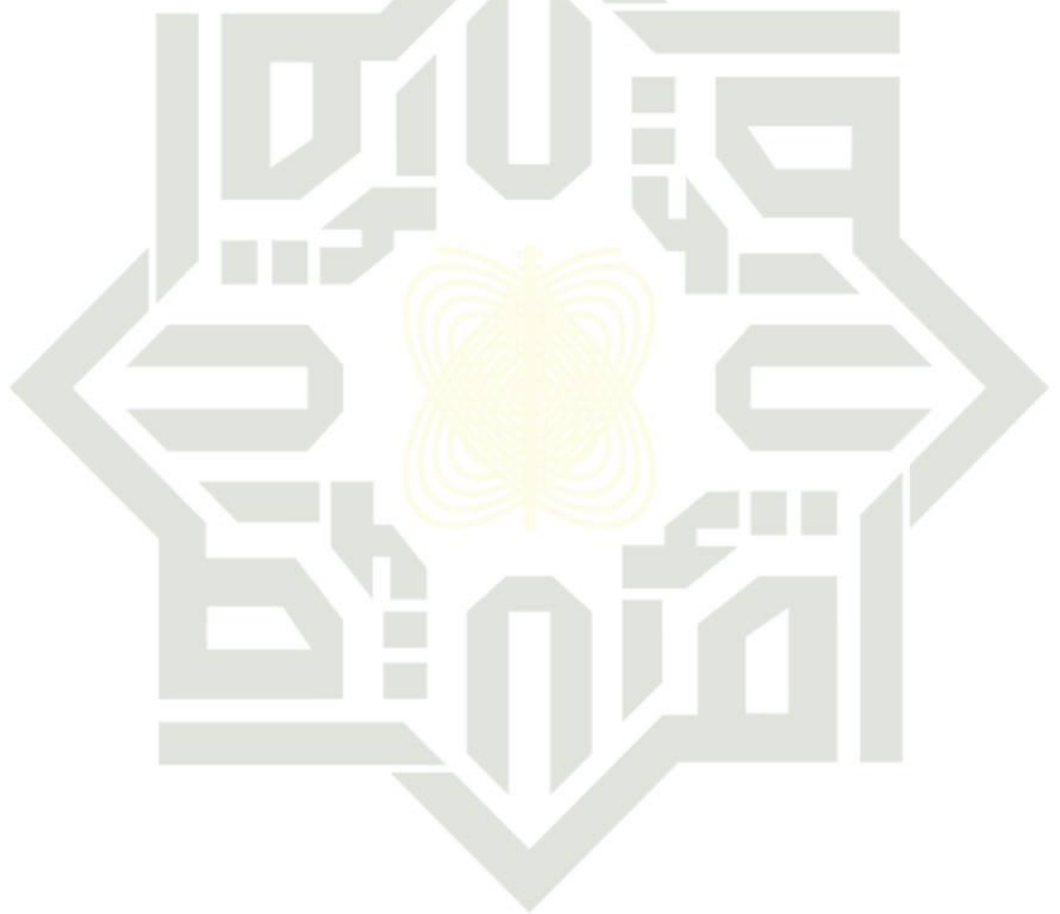
### LAMPIRAN

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR TABEL

Tabel Penelitian Terdahulu.....	61
Indikator Penelitian .....	65
Jumlah Key Informan Penelitian Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University) .....	70



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Kabupaten Siak.....	73
Gambar 5.1	Naskah Surat Edaran oleh Bupati Siak.....	99
Gambar 5.2	Naskah Nota Kesepahaman ( <i>Memorandum of Understanding</i> ).....	103
Gambar 5.3	Gambar Surat Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Antara pemerintah Kabupaten Siak dan Universitas Chiba Jepang yang ditujukan langsung ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. ....	104
Gambar 5.4	Gambar surat Penunjukan sebagai penghubung antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Universitas Chiba Jepang .....	106
Gambar 5.5	Daftar peserta yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Chiba University tahun ajaran 2018 program Magister (S2).....	113
Gambar 5.6	Daftar peserta yang mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru Universitas Chiba University tahun ajaran 2018 program Doktoral (S3).....	114





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang Masalah

Perubahan-perubahan mendasar yang terjadi di lingkungan nasional, regional maupun global telah menuntut kebijakan dan perangkat baru dalam pelaksanaan hubungan antar negara. Sesuai dengan firman Allah Swt didalam ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَنَظْمِ إِنَّ فِي  
لَايَتٍ لِّكَ لِلْعَالَمِينَ ﴿٢٢﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlain-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui”.  
(Q.S Ar-Ruum: 22)

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya meskipun terdapat perbedaan dari masing-masing negara tidak menjadi penghalang untuk saling mengenal dalam rangka mencari pengetahuan dan meningkatkan kemampuan. Dan Allah swt juga saling menyeru hambanya untuk saling mengenal dan bekerjasama dalam kebaikan.

Kemajuan teknologi komunikasi telah mendorong globalisasi saling ketergantungan antar negara dan antar masalah semakin erat. Akibatnya tercipta suatu dunia tanpa batas (*Borderless World*) yang seolah-olah telah membentuk suatu *global village* bagi masyarakat dunia. Sejalan dengan proses globalisasi tersebut, para pelaku hubungan internasional juga meluas, tidak hanya mengikuti negara (*State actors*) saja, namun telah meluas pada aktor-aktor selain negara

(*non-state actor*) seperti organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional (MNCs), media, Pemerintah daerah, kelompok-kelompok minoritas, bahkan individu. Beragamnya aktor yang terlibat dalam hubungan dan kerjasama luar negeri disamping membuat proses pengambilan keputusan semakin kompleks tetapi juga membuka peluang bagi pemantapan diplomasi Indonesia (Kementerian Luar Negeri Indonesia, Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Revisi, 2006: 5).

Dijadikannya pemerintah daerah sebagai salah satu aktor dalam Hubungan Luar Negeri sebagaimana diakui dalam Undang-undang No.37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional sehingga semakin menjadikan pemerintah daerah untuk dapat terlihat dan terlibat langsung dalam memainkan perannya sebagai pelayan publik serta aktor internasional yang baru.

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah di era persaingan globalisasi ini adalah perbaikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, dengan meningkatkan mutu pendidikan. Peran pendidikan dalam memperbaiki sistem pelayanan publik dan peningkatan mutu sumber daya manusia diyakini sangat berbanding lurus dengan yang diharapkan masyarakat, hal ini sesuai dengan hasil penelitian terdahulu yang menunjukkan persentase efek langsung dari pendidikan dan pelatihan serta motivasi kerja pegawai terhadap kualitas pelayanan publik, sebesar 52% (Muh Askal Basir 85:2016).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, terdapat juga isi kandungan ayat Al-qur'an yang juga menyinggung hal yang sama, Sesuai dengan firman Allah SWT, yang berbunyi:

لَهُ مُعَقِّبَتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ  
بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ

وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِنَ وَالٍ ﴿١١﴾

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, sebelum kaum itu sendiri mengubah apa yang ada pada diri mereka” (Q.S Ar-Rad [13]:11).

Hal itu dipandang positif oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Siak yang melihat dan menginginkan perubahan kualitas Sumber daya manusia yang lebih baik dengan membuat kebijakan kerjasama luar negeri dibidang pendidikan. Melalui sebuah kebijakan yang disampaikan langsung oleh salah seorang cendekiawan muda Siak kepada Bupati Siak Drs. H. Syamsuar di era kepemimpinannya melalui pemberian beasiswa pendidikan secara penuh tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Melakukan hubungan kerjasama luar negeri bukanlah suatu hal yang mudah, terlebih lagi bagi negara berkembang seperti Indonesia. Adapun negara yang diajak sebagai partner kerjasama luar negeri oleh Kabupaten Siak salah satunya adalah Jepang, Universitas yang dipilih adalah Chiba University, yang mana merupakan salah satu Universitas terbaik di Jepang khususnya dalam bidang Centre for Enviromental Remote Sensing. Berdasarkan surat undangan yang dikirimkan langsung oleh Prof. Hiroaki Kuze selaku General Chairman IJSS



© Hacı Cipta milih UIN Suska Riau  
Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau  
2016 Vice Director, Centre For Enviromental Remote Sensing. Alasan lain kenapa hanya satu Universitas saja yang diajak untuk menjalin kerjasama adalah karena sebelumnya terdapat alumnus dari Chiba University yang juga merupakan putra daerah berprestasi yang berasal dari Siak.

Berdasarkan surat undangan yang dikirimkan langsung oleh Prof Hiroaki Kuze selaku *General Chairman IJJSS 2016 Vice Director Remote Sensing Chiba University* pada tanggal 23 September 2016, yang berisi ajakan kepada Siak untuk menghadiri penandatanganan kerjasama dalam bentuk MoU (*Memorandum of Understanding*), yang berlangsung pada momen Simposium Intrenasional Bilateral Antara Jepang-Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama (The Indonesian-Japan Joint Scientifict Symposium (IJJSS) 2016 yang diselenggarakan di Keyaki Keikan (gedung konvensi) Universitas Chiba Jepang, sekaligus menjadi payung hukum bagi kedua belah pihak negara yang berkepentingan, karena sesuai dengan isi perjanjian yang terlampir di dalam surat *MoU (Memorandum of Understanding)* tersebut sudah disebutkan dengan jelas bahwa *MoU (Memorandum of Understanding)* tersebut dibuat dalam tiga (3) bahasa, yakni Indonesia, Inggris, dan Jepang, dan apabila terjadi perbedaan penafsiran dari salah satu pihak maka *MoU (Memorandum of Understanding)* yang bertulisan bahasa Inggris lah yang menjadi rujukan bersama.

Tepatnya pada tanggal 20-24 November 2016 menjadi langkah awal bermulanya kerjasama ini, tepatnya pada tanggal 21 November 2016 dilakukannya pula penandatanganan dalam pembahasan pemberian beasiswa tersebut. Adapun dasar dari isi *MoU (Memorandum of Understanding)* adalah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjalinan kerjasama ini sejalan dengan Visi Kabupaten Siak tahun 2016-2021 yakni, **“Terwujudnya Kabupaten Siak yang Maju dan Sejahtera dalam Lingkungan Masyarakat yang Agamis dan Berbudaya Melayu serta Menjadikan Kabupaten Siak Sebagai Tujuan Pariwisata di Sumatera.”**

Selain itu juga telah ditetapkan misi yang selaras dengan prioritas **Nawa Cita** pemerintah dan agenda pembangunan dunia *Sustainable Development Goals (SDGs)*, diantaranya meningkatkan kualitas hidup manusia; mewujudkan kedaulatan pangan; mejamin ketersediaan akses air bersih; serta mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Kerjasama dibidang pendidikan progresnya sangat baik, karena ini bisa menjadi investasi jangka panjang pemerintah setempat dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya masyarakatnya, dan juga sekaligus menjadi sebuah langkah besar dalam rangka ekspansi kekuasaan hingga kemancanegara. Melalui kerjasama ini pula terlihat antusiasme masyarakat Kabupaten Siak dengan semangat daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejalan dan berbanding lurus dengan adanya penyebaran dan sosialisasi tentang pemberian beasiswa kuliah diluar negeri oleh pemerintah setempat yang ditandai dengan adanya surat edaran yang dikeluarkan oleh Bupati Siak Nomor: 893.2/BKPSDM/2017/449 Perihal Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Chiba Jepang yang disampaikan keseluruh Unit-unit OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang disampaikan langsung kesetiap Kepala Dinas masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah), melalui media-media elektronik, dan media cetak resmi milik daerah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selama masa pendaftaran dan penjangkaran, terkumpul 37 (tiga puluh tujuh) orang peserta yang mendaftarkan dirinya, yang mana peserta terbagi atas dua kategori, yang pertama untuk program Magister (S2) sebanyak 34 (tiga puluh empat) orang, dan program Doktorat (S3) sebanyak 3 (tiga) orang yang berhasil diterima berkas pendaftarannya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana dan melengkapi berkas seleksi administrasi berdasarkan ketentuan pendaftaran. Bagi calon-calon mahasiswa tingkat pasca sarjana yang akan dikirimkan ke Jepang, sedang menjalani program intensif pelatihan dan pemantapan bahasa inggris, yang diikuti oleh PNS dan masyarakat umum yang terpilih berdasarkan hasil seleksi ke pusat pemantapan bahasa Inggris di Universitas Islam Riau, yang mana Program berlangsung selama 3 minggu sejak tanggal 11 Maret hingga 25 Maret 2017). Dalam mengikuti penyeleksian, terdapat dua proses yang akan dilalui oleh peserta yang mengikuti program ini, yang pertama tahap penyeleksian dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Siak, Adapun standar kelulusan yang menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan kebijakan ini adalah hasil dari proposal riset yang dibuat oleh peserta dan diakhir program akan diadakan tes TOEFL untuk mengetahui skor yang didapat oleh peserta dengan mengikuti program intensif pemantapan bahasa inggris, dengan kerjasama dengan Universitas Islam Riau, pada tanggal 11 Maret-25 Maret 2017. Selama mengikuti program beasiswa ini, peserta tidak hanya mengikuti tes tertulis dan wawancara yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Siak saja, namun di Jepang pun peserta tetap akan diwajibkan untuk mengikuti tes tertulis



dan wawancara lagi, sampai mereka benar-benar bisa diakui sebagai mahasiswa resmi Chiba University.

Diharapkan bulan Oktober 2017, masyarakat Siak sudah ada yang berangkat kuliah ke Jepang dan untuk seluruh biaya kuliah akan ditanggung oleh pemerintah Jepang. Jumlah peserta yang berhasil lulus untuk diberangkatkan ke Jepang adalah sebanyak 6 (enam) orang, 5 (lima) orang untuk program Magister (S2), dan 1 (satu) orang untuk program Doktoral (S3) (Lembar Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Chiba Jepang No:422.1/Pengumuman/BKPSDM/2017/490).

Meskipun demikian, yang benar-benar mendapatkan LoA (*Latter of Acceptance*) dari pihak Chiba University hanyalah 1 (satu) orang yakni untuk program Studi Perawat Dewasa, namun tidak bisa diberangkatkan karena masalah pembiayaan. Saat ini sudah ada satu (1) orang masyarakat Siak yang berada di Jepang, yang sedang menjalani *Research Student* di Chiba University. Jika dilihat secara umum, implementasi kebijakan ini bisa dikatakan sudah berjalan, namun untuk bisa dikatakan sebagai suatu keberhasilan dari implementasi ini juga belum bisa dikatakan demikian, penulis melihat ada beberapa fenomena terkait kebijakan ini juga belum bisa dikatakan demikian, penulis melihat ada beberapa fenomena terkait kebijakan ini, antara lain, dari tiga puluh tujuh (37) peserta yang mendaftar yang lulus seleksi hanya enam (6) orang, bahkan itu bisa dikatakan sangat jauh dari sejengah jumlah peserta yang mendaftar, kedua, bagaimana untuk masalah pembiayaannya, mengingat kebijakan ini tidak menggunakan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) maupun APBN (Anggaran Pendapatan Belanja

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara), ketiga, Kenapa Siak berani untuk mengambil langkah kerjasama luar negeri ini, apa sebenarnya yang ingin di capai oleh pemerintah Siak dan apa keuntungan yang telah diperoleh Siak dari melakukan kerjasama ini.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk meneliti kerjasama ini secara tertintegrasi, terpadu dan menyeluruh baik dari segi peranan pemerintahnya maupun masyarakatnya yang trelibat. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk meneliti tentang ‘Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University).

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan perumusan masalah yaitu:

- a. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University)
- b. Apa saja faktor-faktor penghambat Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University)

## Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University).

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Mengetahui hambatan Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University).

#### Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis

Untuk mengembangkan teori-teori yang terkait dengan ilmu administrasi tentang administrasi dan organisasi-organisasi internasional yang diperoleh oleh penulis menghubungkannya dengan keyakinan praktek dilapangan dan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi yang akan datang sehingga hasil penelitian ini dijadikan perbandingan dan pedoman.

- b. Manfaat Praktis

Dapat dijadikan pedoman bagi para pihak atau peneliti lain yang akan mengkaji secara lebih mendalam tentang hubungan kerjasama luar negeri yang diadakan oleh pemerintah daerah. Penelitian ini juga dapat menjadi masukan untuk pemimpin pemerintahan dalam memainkan perannya dalam membangun suatu daerah.

Penelitian ini dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran, bahkan masukan serta menambah daftar pustaka perpustakaan



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Sistematika Penulisan

Sistematika laporan dibuat untuk memudahkan pemahaman dan memberi gambaran kepada pembaca tentang penelitian yang diuraikan penulis secara sistematis susunan penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada Bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini merupakan bab yang berisi tentang beberapa teori yang melandasi penulisan ini, teori-teori kebijakan publik, faktor yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan, Kerjasama Luar Negeri, Pemerintah Daerah, Pendidikan, Beasiswa, Definisi Konsep, Kerangka Pemikir, dan Konsep Operasional.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini digunakan untuk menguraikan jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informasi peneliti, dan diakhiri dengan metode analisa data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN**

Bab ini berisikan sejarah singkat Kabupaten Siak, Visi Misi, sejarah Singkat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan sub yang berisikan tentang hasil penelitian dilapangan yaitu mengenai Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa Di Chiba University), mengetahui hambatan dan upaya pengimplementasian kebijakan kerjasama luar negeri.

**BAB VI : PENUTUP**

Pada bab ini menerangkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang terkait dengan masalah temuan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Pengertian Kebijakan

Versi formal yang dibuat oleh perserikatan bangsa-bangsa (PBB), yang dikutip Solichin Abdul Wahab telah memberikan makna kebijakan sebagai berikut: Kebijakan ialah pedoman untuk bertindak. Pedoman itu bisa saja amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas dan sempit, kabur dan jelas, longgar dan terperinci, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat.

Kebijakan dalam maknanya seperti berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana (**Wahab, 2012:9**).

Menurut pendapat (**Anderson dalam Wahab, 2012:8**) Kebijakan ialah suatu langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Kemudian pendapat tersebut ditegaskan oleh (**Rose dalam Hamdi, 2014:36**) yang mengartikan kebijakan (*Policy*) lebih sebagai suatu rangkaian panjang dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dan akibatnya bagi mereka yang berkepentingan, daripada hanya sekedar suatu keputusan.

Pendapat lainnya dikemukakan oleh (**Friedrich dalam Hamdi, 2014: 36**) yang memandang kebijakan sebagai suatu tindakan yang disarankan mengenai perorangan, kelompok atau pemerintahan dalam suatu lingkungan tertentu yang berisikan hambatan dan kesempatan yang akan diatasi atau dimanfaatkan melalui kebijakan yang disarankan dalam upaya mencapai tujuan atau mewujudkan suatu



maksud. Selain itu terdapat juga pendapat lain yang dikemukakan oleh **Anderson dalam Hamdi 2014:36)** yang mengartikan kebijakan sebagai suatu rangkaian tindakan bertujuan yang diikuti oleh seseorang atau sekelompok aktor berkenaan dengan suatu masalah atau suatu hal yang menarik perhatian.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat penulis simpulkan bahwa kebijakan ialah segala bentuk petunjuk, pedoman, aturan dan arahan yang sifatnya mengikat yang dibuat oleh aktor pembuat kebijakan melalui tahap pertimbangan dan penetapan kesepakatan mengenai aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan pemerintahan atau publik dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah publik.

Seperti kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University) menjadi sebuah kebijakan terkait dengan program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak dalam menghadapi arus globalisasi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Berpijak pada undang-undang tersebut pemerintah Daerah kabupaten Siak memberanikan langkahnya untuk melakukan sebuah gebrakan besar dengan melakukan kebijakan kerjasama luar negeri di bidang pendidikan, dalam hal pengembangan sumber daya manusia, penelitian, konsultasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan ini merupakan salah satu langkah besar dari Pemerintah setempat untuk memainkan perannya sebagai salah satu aktor internasional yang baru, sekaligus melibatkan masyarakat Kabupaten Siak untuk lebih berani lagi untuk berkompetisi ditingkat internasional.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.1 Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud (**Agustino, 2008:7**)

Kebijakan publik menurut (**Sulaiman, 1988:5**) adalah sebagai kebijakan negara/pemerintah adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan atau lembaga dan pejabat pemerintah.

Sedangkan menurut (**Dunn, 2003:132**) mengatakan kebijakan publik adalah pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah.

Kebijakan publik merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan (**Winarno, 2002:16**). Selain itu dalam praktiknya kebijakan publik baiknya harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut (**Widodo, 2001:190**) :

- a. Kebijakan selalu mempunyai tujuan atau berorientasi pada tujuan tertentu
- b. Kebijakan berisi tindakan atau pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah
- c. Kebijakan adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, dan bukan apa yang bermaksud akan dilakukan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Kebijakan publik bersifat positif (merupakan tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu) dan bersifat negatif (keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu)
- e. Kebijakan publik (positif), selalu berdasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu yang bersifat memaksa (otoritatif).

Kebijakan publik adalah kebijakan yang oleh lembaga-lembaga pemerintah dan pejabat-pejabat pemerintah harus mendapat perhatian sebaik-baiknya agar kita bisa membedakan kebijakan publik dengan bentuk kebijakan yang lain. Seperti kebijakan yang dikeluarkan pihak swasta dan lainnya (Winarno, 2007:19). Untuk memudahkan pemahaman kebijakan publik, dapat ditinjau dari 5 karakteristik kebijakan publik, yaitu:

- a. Memiliki tujuan yang disepakati untuk dicapai atau tujuan yang dipahami;
- b. Melibatkan keputusan beserta konsekuensinya;
- c. Terstruktur dan tersusun menurut aturan tertentu;
- d. Pada hakikatnya adalah politik;
- e. Bersifat dinamis.

Menurut (Nugroho, 2011:143), ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu:

- a. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional
- b. Kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sementara menurut Young dan Quinn (**dalam Suharno 2008:44**)

membahas beberapa konsep kunci yang ada dalam kebijakan publik:

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik atau tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintahan yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berusaha merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang dimasyarakat
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Berdasarkan pendapat diatas dapat penulis tarik kesimpulan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan/ kegiatan yang diusulkan oleh perorangan/ kelompok

bersifat kolektif dan kompleks yang diajukan kepada pemerintah yang memiliki tujuan dan memiliki orientasi yang jelas.

### 2.1.2 Tujuan Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu perangkat, mekanisme dan sistem yang dapat mengarahkan dan menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Ada beberapa tujuan dari kebijakan publik, yakni mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi dimasyarakat.

- a. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara individual melainkan harus melakukan tindakan kolektif;
- b. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural;
- c. Meningkatkan situasi lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan pencapaian kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat dan martabat manusia;
- d. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial (Suharto, 2005:62).

### 2.1.3 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap Kebijakan Publik oleh (Winarno, 2007:32) adalah sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini pejabat yang dipilih dan diangkat menetapkan atau mengumpulkan masalah-masalah publik pada agenda publik.

b. Tahap formulasi kebijakan

Pada tahap ini masalah yang telah dimasukkan keagenda kebijakan kemudia dibahas oleh para pembuat keputusan dan diberikan beberapa alternatif penyelesaian.

a) Tahap dopsi kebijakan

Pada tahap ini banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus, antara direktur lemagab atau keputusan pengadilan.

b) Tahap impementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah.

c) Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang telah dibuat telah mampu memecahkan masalah.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2.1.4 Implementasi Kebijakan Publik

Dalam berbagai sistem politik, kebijakan publik diimplementasikan oleh badan-badan pemerintah. Badan-badan tersebut melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pemerintah dari hari ke hari yang membawa dampak pada warga negaranya.

Namun, dalam praktik badan-badan pemerintahnya sering menghadapi pekerjaan-pekerjaan di bawah mandat dari undang-undang untuk membuat diskresi, untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Dalam arti seluas-luasnya, implementasi juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasian atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang yang menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi (publik atau privat), prosedur, dan teknis secara sinergitas yang digerakkan untuk berkerjasama guna meredakan kebijakan tertentu yang dikehendaki.

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua langkah yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program; atau melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari kebijakan publik tersebut sebagai kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan (Nugroho, 2006:494).

Van Meter dan Horn dalam (Agustino, 2014:139), menyatakan bahwa: implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu/individu pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Definisi lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam (Agustino 2012:8) mendefinisikan kebijakan sebagai:

Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan pengadilan. Lazimnya keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang bersifat dinamis, dimana peran penting dari seorang pemangku jabatan dalam melakukan tindakan secara cepat, tepat dan terukur serta mempunyai tujuan yang jelas terhadap arah kebijakan tersebut.

#### Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Menurut Model Implementasi Kebijakan Edward III

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak variabel atau faktor, dan masing-masing variable tersebut berhubungan satu sama lain. Menurut George Edward III dalam (Subarsono, 2011: 90-92) berpandangan bahwa implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat Variabel, yaitu:

##### a. Komunikasi

Yaitu Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

#### b. Sumberdaya

Meskipun isi kebijakan telah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud, sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial, sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif .

#### c. Disposisi/ Sikap Pelaksana

Disposisi adalah karakteristik atau watak yang dimiliki implementor, seperti komitmen, kejujuran, ketaatan pada aturan, sifat demokratis. Apabila *Implementor* memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan juga tidak menjadi efektif.

#### d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Aspek dari struktur organisasi adalah *Standard Operating Procedure* (SOP) dan fragmentasi. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, yang menjadikan aktivitas organisasi tidak fleksibel.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pandangan Edward III (**dalam Winarno, 2008: 181**) sumber-sumber yang penting meliputi, staff yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas mereka, wewenang dan fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk menerjemahkan usul-usul diatas guna melaksanakan pelayanan-pelayanan publik.

Struktur birokrasi menurut Edward III (**dalam Winarno, 2008: 203**) terdapat dua karakter utama, yakni *Standard Operating Procedures (SOP)* dan fragmentasi:

SOP atau prosedur-prosedur kerja ukuran-ukuran dasar berkembang sebagai tanggapan internal terhadap waktu yang terbatas dan sumber-sumber dari para pelaksana serta keinginan untuk keseragaman dalam bekerjanya organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Sedangkan fragmentasi berasal dari tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, kelompok-kelompok kepentingan pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi pemerintah.

Birokrasi merupakan salah satu institusi paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan kebijakan. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks harus dijalankan secara kondusif agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka memahami struktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Yang menjadi karakteristik disini adalah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a) *Standard operating prosedur (SOP)*

*Standard operating prosedur* merupakan tuntutan intrenal akan kepastian waktu dari sumber daya dalam organisasi. Ini adalah dilihat dari struktural yang paling dasar dari organisasi adalah prosedur-prosedur kerja. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dengan baik dan implementasi dapat berjalan dengan baik.

#### b) Fragmentasi atau tanggung jawab

Sifat kedua dari struktur yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu kebijakan sering dijadikan sebagai usaha-usaha yang memungkinkan mereka mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan dengan telah direncanakan demi keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan.

### 2.1.5 Konsep Implementasi

Dalam Wahab, SA, kamus *webster*, merumuskan secara pendek bahwa *implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect* (menimbulkan dampak terhadap sesuatu); kalau pandangan ini kita ikuti maka implementasi kebijakan ataupun kebijaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan-pemerintah, keputusan pengadilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden).

Sebagai pangkal tolak pikir, kita harus tau bahwa implementasi yang dilakukan merupakan program pemerintah dalam mengatasi masalah yang dihadapi dilingkungannya. Pasti akan melibatkan sejumlah pembuat kebijakan

yang berusaha keras untuk mempengaruhi perilaku birokrat sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat.

Dilihat dari sudut pandang pusat, maka fokus analisis implementasi kebijakan itu akan mencakup usaha-usaha yang dilakukan oleh pejabat-pejabat atasan atau lembaga-lembaga ditingkat yang lebih rendah/daerah dalam upaya mereka memberikan pelayanan untuk masyarakat/kelompok sasaran dari penegakkan aturan program bersangkutan. (Wahab 2004:63).

Dalam era globalisasi dimana dunia dihadapkan pula pada ketidakpastian, informasi teknologi yang semakin canggih, masyarakat yang semakin menuntut dan persaingan semakin ketat, maka birokrasi yang semakin ini tidak dapat bekerja. Untuk mengantisipasinya birokrasi perlu melakukan perubahan-perubahan terutama kultur organisasi.

#### 2.1.6 Landasan Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan itu pada prinsipnya adalah cara atau langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Bagi mereka yang melihat kebijakan publik dari perspektif *policy cycle* (siklus kebijakan), implementasi kebijakan itu merupakan suatu aktivitas yang paling penting. Tetapi, tidak seperti anggapan sebagian orang bahwa setiap kebijakan itu akan diimplementasikan dengan sendirinya, seolah aktivitas implementasi kebijakan tersebut menyangkut sesuatu yang tinggal jalan.

Realita menunjukan, implementasi kebijakan itu sejak awal melibatkan sebuah proses rasional dan emosional yang teramat kompleks. Jadi, ia bukan sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran politik ke dalam



prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu. Studi implementasi, mau tak mau, akan memasuki ranah permasalahan konflik, keputusan-keputusan yang pelik, dan isu mengenai siapa yang memperoleh apa, berapa banyak dari suatu kebijakan. Oleh sebab itu, tidak terlalu salah jika dikatakan implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dari keseluruhan proses kebijakan bahkan pakar kebijakan asal Afrika, Udoji dalam (Wahab, 2014: 126), dengan tegas pernah mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu hal penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Sayangnya, dalam khazanah pengetahuan yang kini kita kenal dengan sebutan studi atau analisis kebijakan publik, harus diakui bahwa hanya baru pada dasawarsa terakhir ini saja para ilmuwan sosial, khususnya para ahli ilmu politik, menaruh perhatian yang besar terhadap masalah proses implementasi kebijakan atau menerimanya sebagai bagian integral dari studi proses perumusan kebijakan (*public policy formulation*). Pada umumnya, studi atau penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli beberapa waktu yang lalu, telah cenderung untuk memperhatikan pada masalah keputusan (*decision*) daripada masalah kebijakan ini sendiri, sehingga perhatian para ahli lebih tertuju pada masalah *the moment of choice*. Yang menjadi fokus mereka ialah saat-saat ditentukannya pemilihan alternatif atau saat-saat dimana lazimnya suatu keputusan diambil, atau suatu strategi kebijakan tertentu dibuat/dirumuskan. Dengan perkataan lain, para ahli pada masa itu terlalu asyik dengan persoalan-persoalan perumusan kebijakan dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak membiarkan masalah-masalah praktis dan rinci mengenai implementasi kebijakan itu menjadi urusan para administrator sendiri untuk memikirkannya. Gunn dalam (Wahab, 2014: 127).

Akibatnya, sedikit sekali perhatian yang diberikan oleh para ahli ilmu politik terhadap persoalan-persoalan implementasi kebijakan tersebut. Masalah yang bertalian dengan implementasi kebijakan ini, yang lama terlantar, kemudian lebih menjadi perhatian dari berbagai kelompok ahli lain, semisal ahli administrasi publik/administrasi negara (*public administration*) atau ahli-ahli manajemen publik (*public management*). Tidak heran jika selama puluhan tahun dalam studi kebijakan publik, terdapat semacam mata rantai yang hilang (*missing-link*) antara tahap perumusan kebijakan dengan tahap evaluasi akhir (*outcomes*) kebijakan publik Hargrove dalam (Wahab, 2014:127).

Proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan atau direncanakan oleh *Policy Maker* dengan apa yang senyatanya dicapai, sebagai hasil atau prestasi dari pelaksanaan kebijakan. Meskipun implementasi kebijakan itu penting, tetapi baru beberapa waktu terakhir saja para ilmuwan sosial menaruh perhatian terhadap masalah implementasi dalam proses kebijakan. Salah satu akibat kurang adanya perhatian pada implementasi kebijakan adalah adanya semacam “mata rantai yang hilang” antara tahap perumusan kebijakan dan evaluasi kebijakan. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa kebanyakan pemerintah di dunia ini baru mampu untuk mensahkan kebijakan dan belum sepenuhnya mampu untuk menjamin bahwa

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebijakan yang telah disahkan itu benar-benar akan menimbulkan dampak atau perubahan yang diinginkan (**Wahab, 2014:126-127**).

Pada prinsipnya implementasi kebijakan itu adalah cara atau langkah yang dilakukan agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, oleh Mazmanian dan Sabatier dalam (**Sirajuddin, 4:2014**) disebut sebagai upaya melaksanakan keputusan. Mengimplementasikan suatu kebijakan publik dapat dilakukan dengan dua pilihan, yakni langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program dan diimplementasikan melalui formulasi kebijakan derivat atau turunan dari suatu kebijakan publik. Sementara itu, beberapa ahli memperkenalkan model implementasi kebijakan publik, yaitu: (1) Model diperkenalkan Donald Van Meter dengan Donald Van Horn (1975), (2) Model yang diperkenalkan Daniel Mazmamian dan Paul A. Sabatier (1983), (3) Model Brian W Hoogwood dan Lewis A. Gunn (1978), (4) Model Grindle (1980), (5) Model yang disusun oleh Elmore (1979), Michael Lipsky (1971), dan Benny Hjern dan David O'porter (1981), (6) Model George C Edward III (1980).

Setelah memahami enam model implementasi kebijakan diatas, pertanyaan yang menyertainya adalah model mana yang terbaik untuk digunakan? Diakui Nugroho dalam (**Sirajuddin, 4:2014**) tidak ada model yang terbaik. Melainkan setiap jenis kebijakan publik memerlukan model implementasi kebijakan yang berlainan. Dengan demikian, untuk memilih model yang terbaik seharusnya memperimbangkan prinsip ‘empat tepat’. *Tepat pertama*, menyangkut jawaban terhadap pertanyaan berikut: 1) apakah kebijakannya sendiri sudah tepat. Ketepatan ini dapat dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan



Hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dicapai, 2) apakah kebijakan tersebut sudah dirumuskan sesuai dengan karakter masalah yang hendak dipecahkan, 3) apakah kebijakan dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan misi (kelembagaan) yang sesuai dengan kebijakannya. *Tepat kedua*, adalah tepat pelaksanaannya. Ada tiga lembaga yang dapat menjadi pelaksana, yaitu pemerintah, kerjasama antara pemerintah-masyarakat/swasta, atau implementasi kebijakan yang diswastakan (*Privatization atau Contracting out*). *Tepat ketiga*, adalah tepat target. Ketepatan target ini berkenaan dengan 3 hal yaitu: 1) apakah target yang diintervensi sesuai dengan yang direncanakan, apakah tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, atau tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain, 2) apakah targetnya dalam kondisi siap untuk diintervensi, ataukah tidak, dan 3) apakah intervensi implementasi kebijakan bersifat baru atau memperbaharui implementasi kebijakan sebelumnya. *Tepat keempat*, adalah tepat lingkungan. Ada dua lingkungan yang paling menentukan, yaitu lingkungan kebijakan dan lingkungan eksternal.

Selain itu terdapat juga terkait dengan gagalnya implementasi kebijakan, seperti yang dikemukakan oleh McConnel dalam (**Michael Howlett, 2012:542**) mendefinisikan bahwa suatu kebijakan dikatakan gagal itu ketika tidak mencapai tujuan dan komponen yang ditetapkan untuk mencapai tujuan dan tidak lagi menerima dukungan dari mereka (penerima kebijakan).

Dalam kenyataannya kebijakan publik itu mengandung resiko untuk mengalami kegagalan Hoogwood dan Gunn dalam (**Wahab, 2014:128- 129**). Menurut Purwanto dan Sulistyastuti (**2012:85-87**) menyebutkan faktor-faktor

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menjadi penentu kegagalan dari implementasi kebijakan publik setidaknya ada enam faktor, yaitu:

Kualitas kebijakan itu sendiri yaitu kejelasan tujuan, kejelasan implementator atau penanggung jawab implementasi, dan lainnya. Kualitas kebijakan juga ditentukan oleh proses perumusan kebijakan, apakah kebijakan tersebut dirumuskan secara demokratis atau tidak.

Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran). Suatu kebijakan atau program tidak akan bisa mencapai tujuan atau sasaran tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai. Secara hipotesis bisa dirumuskan bahwa semakin besar anggaran yang diperuntukkan bagi suatu kebijakan, maka semakin besar pula peluang keberhasilan implementasi kebijakan.

3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan (pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).

4. Kapasitas implementator (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya). Struktur organisasi yang terlalu hirarkis akan menghambat proses kebijakan.

Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran. Karakteristik kelompok sasaran akan sangat mempengaruhi dukungan kelompok sasaran terhadap proses implementasi.

Kondisi lingkungan geografis, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi kebijakan dilakukan. Kebijakan yang berkualitas tidak akan berhasil diimplementasikan dalam situasi dan kondisi lingkungan yang tidak kondusif.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa implementasi kebijakan diartikan sebagai sebuah cara yang dirumuskan berdasarkan permasalahan yang dihadapi disuatu area publik, dan menghasilkan solusi-solusi yang memiliki resiko terkecil dari suatu masalah berdasarkan telaah dan hasil pemikiran yang panjang oleh ahlinya.

### 2.1.7 Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik merupakan bagian atau tahap terakhir dari suatu kebijakan publik, dengan kata lain sebuah kebijakan publik tidak dapat dilepas begitu saja melainkan harus diawasi, dan salah satu mekanisme pengawasan tersebut disebut sebagai "Evaluasi Kebijakan". Evaluasi kebijakan itu sendiri dilakukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan publik guna dipertanggung jawabkan kepada konstituennya selain itu, evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan serta untuk mencari kekurangan sekaligus untuk menutup kekurangan.

Terkait dengan evaluasi kebijakan publik Ernest R. House dalam (Sirajuddin, 2014:5) membuat taksonomi evaluasi kebijakan publik melalui beberapa model, yaitu: (1) model system dengan indikator utama adalah efisiensi, (2) model perilaku dengan indikator utama produktivitas dan akuntabilitas, (3) model formulasi keputusan dengan indikator utama adalah keefektifan dan keterjagaan kualitas, (4) model tujuan bebas (*goal free*) dengan indikator utama adalah pilihan pengguna dan manfaat sosial, (5) model kekritisian seni (*art criticism*) dengan indikator utama standar yang semakin baik dan kesadaran yang semakin meningkat, (6) model review profesional dengan indikator utama adalah



penerimaan profesional, (7) model kuasi-legal (*quasi-legal*) dengan indikator utama adalah resolusi, serta (8) model studi kasus dengan indikator utama adalah pemahaman atas diversitas.

Sementara itu James Anderson dalam Winarno dikutip dalam (Sirajuddin, 2014:5) membagi evaluasi implementasi kebijakan publik menjadi tiga, yaitu: (1) evaluasi kebijakan publik yang dipahami sebagai kegiatan fungsional, (2) evaluasi yang memfokuskan pada bekerjanya kebijakan, serta (3) evaluasi kebijakan sistematis yang melihat secara objektif program-program kebijakan yang ditujukan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan sejauh mana tujuan-tujuan yang ada telah dinyatakan dicapai.

## 2.2 Kerjasama Luar Negeri

### 2.2.1 Pengertian Kerjasama Luar Negeri

Menurut Robert O. Keohane dalam (Griffin, 2009:107) kerjasama internasional mengatakan suatu negara melakukan hubungan internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya. Untuk itu Negara tersebut perlu melakukan kerjasama untuk mencapai kepentingan eksternalnya.

Menurut K.J Holstri (dalam terjemahan Azhari;1988:652-653) mendefinisikan kerjasama internasional sebagai berikut:

Pandangan bahwa dua atau lebih kepentingan, nilai atau tujuan saling bertemu dan dapat menganalisa sesuatu, dipromosikan atau dipenuhi oleh semua pihak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pandangan atau harapan dari suatu Negara bahwa kebijakan yang diputuskan oleh Negara lainnya akan membantu Negara itu untuk mencapai kepentingan dan nilai-nilainya.

Persetujuan atau masalah-masalah tertentu antara dua Negara atau lebih dalam rangka memanfaatkan persamaan kepentingan atau benturan kepentingan.

Seperti yang penulis kutip dalam **(Zulkifli, 32:2012)** yang mengatakan bahwa hubungan dan kerjasama internasional muncul karena keadaan dan kebutuhan masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimilikipun tidak sama. Hal ini menjadikan suatu negara membutuhkan kemampuan dan kebutuhannya yang ada dinegara lainnya.

Kerjasama internsional akan sangat penting sehingga patut dipelihara dan diadakan suatu pengaturan agar berjalan dengan tertib dan manfaatnya dapat dimaksimal sehingga tumbuh rasa persahabatan dan saling pengertian antar negara satu dengan lainnya.

Dari beberapa pengertian diatas penulis menyimpulkan bahwa kerjasama internasional adalah bentu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua Negara (Bilateral) atau lebih (Multilateral) dalam memenuhi kebutuhan nasionalnya dimana Negara-negara tersebut saling bertemu, memiliki tujuan, memiliki kepentingan atas dasar persamaan satu sama lain untuk menopang pemecahan masalah tertentu dan mengakhiri perundingan dengan membentuk beberapa perjanjian, atau saling pengertian satu sama lain dan tidak merugikan semua pihak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.2.2 Perjanjian Internasional Sebagai Instrumen Hukum Kerjasama Internasional

## 2.2.3 Definisi dan Ruang Lingkup

Secara administratif daerah merupakan penanggung jawab atas berjalannya roda pemerintah dan tercapainya kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerahnya. Oleh karena itu, dalam pembahasan selanjutnya akan dibahas selain ketentuan-ketentuan yang ada terkait perjanjian internasional yang merupakan dasar atas terlaksananya hubungan luar negeri ataupun bentuk kerjasama luar negeri juga diuraikan ketentuan hukum dan peluang pemerintah daerah untuk terlibat dalam kerjasama internasional umumnya dan secara khusus agar diperoleh suatu pemahaman (Zulkifli, 2012: 66) terkait dampaknya pada pengelolaan pemerintahan daerah yang efektif.

Mencermati perjanjian keberlakuan hukum perjanjian internasional yang merupakan suatu hukum internasional positif, diantaranya *Vieena Convention on the Law of Threaties 1969* (Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian Tahun 1969) selanjutnya juga dikenal dengan Konvensi Wina, dan *Convention of treaties between states and international organisation and between international organisation and International Organisation 1986* (Konvensi tentang Hukum Perjanjian Antara Negara Dan Organisasi Internasional) selanjutnya disebut juga Konvensi Wina 1986. (Tabloid Diplomatik dalam Zulkifli 2012:67).

Untuk itu memahami bentuk dan perjanjian internasional ada baiknya melihat beberapa definisi diantaranya yang dinyatakan pasal 2 ayat (1) huruf a, *Vienna Convension on the Law Treaties 1969* menyatakan: Perjanjian berarti



suatu persetujuan internasional yang diatur oleh hukum internasional dan dirumuskan dalam bentuk tertulis, antara satu atau lebih negara dan satu atau lebih organisasi internasional atau sesama organisasi internasional baik persetujuan itu berupa satu instrumen atau lebih dari satu instrumen yang saling berkaitan dan tanpa memandang apapun juga namanya.

Adapun dalam hukum positif Indonesia yakni Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional pasal 1 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa: Perjanjian Internasional adalah perjanjian, dalam bentuk dan nama tertentu, yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik.

Kemudian dinyatakan pula pada pasal 4 ayat (1) bahwa:

Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian Internasional dengan satu negara atau lebih, Organisasi Internasional, atau Subjek Hukum Internasional lain berdasarkan kesepakatan; dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik.

Sejalan dengan Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian pasal 26 telah menyatakan dalam hal ini bahwa tiap-tiap perjanjian yang berlaku mengikat negara-negara pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik atau *in good faith*.

Prinsip ini merupakan dasar pokok hukum perjanjian dan telah diakui secara universal dan yang merupakan bagian dari prinsip-prinsip hukum umum (*general principle of law*) (I Wayan Parthiana, dalam Zulkifli 2012: 67). Sedangkan menurut Sumaryo Suryokusumo, prinsip itikad baik (*good faith*), merupakan persyaratan moral agar perjanjian tersebut dapat dilakukan dengan sungguh-

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebenarnya. Karena i'tikad baik juga merupakan pokok dari konsep *Panca Sunda* secara keseluruhan yang telah dipegang teguh dalam banyak hukum dan arbitrase (Sumaryo Suryokusumo dalam Zulkifli 2012:68).

Berdasarkan pengertian Perjanjian Internasional menurut konvensi Wina dapat dijabarkan beberapa unsur atau kualifikasi yang harus terpenuhi dalam suatu perjanjian, untuk dapat disebut sebagai Perjanjian Internasional, yaitu: kata sepakat, subyek-subyek hukum Internasional, berbentuk tertulis, obyek tertentu, dan tunduk pada atau diatur oleh hukum Internasional (I Wayan Parthiana dalam Zulkifli 2012:68).

Adapun unsur yang paling utama dalam perjanjian internasional yaitu persetujuan para pihak yang diberikan secara sukarela, sebagaimana yang terjadi dalam hukum perdata (Wirjono Prodjodikoro dalam Zulkifli 2012: 68) .

#### 2.2.4. Proses Pembentukan Perjanjian Internasional

Pembuatan Perjanjian Internasional adalah perbuatan hukum yang oleh para pihak yang membuatnya. Dengan demikian, secara umum dapat dikatakan bahwa ciri-ciri suatu perjanjian internasional adalah bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh subjek hukum internasional, pembuatannya diatur oleh hukum internasional, dan menimbulkan akibat hukum yang mengikat bagi para pihak yang membuatnya (Boer Mauna, dalam Zulkifli 2012: 69). Pihak-pihak yang bermaksud untuk membuat atau merumuskan suatu perjanjian internasional biasanya, terlebih dahulu melakukan pendekatan-pendekatan baik yang bersifat informal maupun formal.

Disamping itu, juga bisa dilakukan melalui forum organisasi internasional baik yang regional maupun global. Pendekatan informal maupun global tersebut di tindak lanjuti dengan tahapan pembuatan perjanjian internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi Wina 1969 maupun Konvensi Wina 1986, yaitu dengan menunjukan wakil masing-masing pihak yang diberikan tugas dan wewenang untuk mengadakan perundingan, penyerahan surat kuasa atau pertukaran kuasa penuh (*full power*) oleh wakil-wakil masing-masing pihak, perundingan untuk membahas materi yang akan dimasukkan dan dirumuskan sebagai klausul perjanjian, penerimaan naskah perjanjian (*adoption of the text*), pengotentasian naskah perjanjian (*authentication of the text*), pernyataan persetujuan untuk terikat pada perjanjian (*consent to be bound by a treaty*), penentuan saat mulai berlakunya suatu perjanjian internasional (*entry into force of a a treaty*), penyimpanan naskah perjanjian (*depository of treaty*) serta pendaftaran dan pengumuman perjanjian (*registration and publication*).

## 2.2.5 Pengesahan Perjanjian Internasional

Setelah suatu naskah secara resmi diterima sebagai naskah yang otentik, perjanjian itu belum mengikat para pihak dan dengan demikian belum memiliki kekuatan mengikat sebagai hukum internasional positif, kecuali jika disepakati bahwa pengotentikasian sekaligus juga sebagai pernyataan persetujuan untuk terikat pada perjanjian, penerimaan naskah (*adoption of the text*) bermakna sebagai konstatering formal dari negara-negara peserta konferensi, bahwa konferensi internasional telah berhasil merumuskan suatu naskah perjanjian internasional yang tidak dapat diubah lagi. Hal ini kemudian dilanjutkan dengan



otentikasi naskah (*authentication of the text*) yang merupakan tindakan resmi dari negara peserta dan bermakna bahwa naskah perjanjian telah diterima negara peserta dengan pencantuman tanda tangan atau paraf pada lembar-lembar naskah perjanjian. Pencantuman tanda tangan/ paraf, belum menjadikan negara peserta konferensi terikat pada perjanjian internasional (Eddy Damian “*Jurnal Hukum Internasional*” Vol.2 No.3 Desember 2003).

Supaya perjanjian itu mengikat sebagai hukum internasional positif, maka negara-negara itu perlu menyatakan persetujuannya untuk terikat secara tegas pada perjanjian. Pengesahan perjanjian internasional pada hakikatnya merupakan tindakan atau pernyataan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian (*consent to be bound by a treaty*). Jika dia tidak menyatakan persetujuannya untuk terikat atau secara tegas menolak untuk terikat, maka perjanjian itu tidak akan pernah ada mengikatnya. Persetujuan ataupun penolakan untuk terikat pada suatu perjanjian adalah manifestasi dari kedaulatan setiap negara. Sebagai negara berdaulat tentunya tidak bisa dipaksa oleh kekuatan apapun untuk menerima sesuatu yang tidak dikehendaknya, seperti menyatakan terikat pada suatu perjanjian internasional.

Oleh karena itu, persetujuan untuk mengikatkan diri pada perjanjian merupakan faktor yang sangat penting, karena suatu negara hanya dapat terikat oleh perjanjian tersebut jika mereka telah menyatakan persetujuannya itu tersebut untuk terikat pada perjanjian. Beberapa cara untuk menyatakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada perjanjian internasional ditentukan didalam perjanjian itu sendiri sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam konvensi Wina tentang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjanjian pasal 11 menentukan beberapa cara untuk menyatakan persetujuan untuk terikat pada perjanjian, yaitu dengan penandatanganan (*Signature*), pertukaran instrumen yang membnetuk perjanjian (*exchange of instrumens constituting of treaty*), ratifikasi (*ratification*), aksepsi (*acceptance*) persetujuan atau aksesi (*approval*), atau cara lain yang disetujui dalam perjanjian.

Persetujuan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian internasional dinyatakan dengan penandatanganan pada wakil-wakil nya, apabila:

- a) Perjanjian itu sendiri menentukan bahwa penandatanganan tersebut menjadikan negara-negara itu terikat apda perjanjian tersebut;
- b) Sebaliknya negara-negara yang melakukan perundingan menyepakati bahwa penandatanganan akan menjadikan negara-negara itu terikat pada perjanjian tersebut;
- c) Maksud dari suatu negara untuk menjadikan terikat dengan cara pendatanganan tersebut tampak dari kuasa penuh dari wakilnya atau dinyatakan selama perundingan.

untuk maksud ayat 1:

- a) Pamarafan atas naskah perjanjian adalah juga merupakan penandatanganan atas perjanjian, apabila ditetapkan bahwa negara-negara yang melakukan perundingan menyetujui demikian;
- b) Penandatanganan atas suatu perjanjian oleh salah seornag wakil (dengan catatan menunggu konfirmasi atas pertimbangan lebih lanjut) *ad referendum*, jika kemudia diberikan konfirmasi oleh negara yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berangkutan, merupakan suatu penandatanganan yang penuh atas perjanjian tersebut.

Kesepakatan untuk mengikat diri yang dinyatakan dengan penandatanganan pada umumnya dilakukan pada perjanjian dari segi substansinya tergolong sebagai perjanjian yang tidak terlalu penting, tidak mengakibatkan pembentukan kaidah hukum baru, dan lebih bersifat teknis. Atas dasar pertimbangan ini, pengikatan diri pada perjanjian cukup dilakukan oleh wakil negara peserta dan dengan penandatanganan oleh wakilnya tersebut maka perjanjian terkait menjadi mengikat negara-negara yang **berangkutan (I Wayan Parthiana dalam Zulkifli 2012:72)**.

Pernyataan kesepakatan suatu negara untuk terikat pada suatu perjanjian melalui penandatanganan wakil-wakilnya dapat ditentukan dalam perjanjian itu sendiri atau sebaliknya negara-negara yang melakukan perundingan menyepakati bahwa penandatanganan merupakan pernyataan terikat pada perjanjian tersebut, asalkan hal tersebut sesuai dengan surat kuasa penuh yang diberikan oleh negara kepada wakilnya. Apabila perjanjian itu mensyaratkan adanya ratifikasi sebagai pengikatan diri atau surat kuasa penuh dari wakil negara itu dibuat untuk ratifikasi, maka penandatanganan itu hanya berpengaruh pada tahap pertengahan saja dan bukan merupakan pernyataan kesepakatan untuk terikat pada perjanjian **(Sumaryo Soryokusumo dalam Zulkifli 2012:73)**.

Negara yang menandatangani perjanjian mempunyai kewajiban untuk tidak melakukan tindakan yang akan menggagalkan maksud dan tujuan perjanjian itu sampai negara tersebut menyatakan secara jelas apakah akan mengikatkan diri



atau tidak kepada perjanjian tersebut (N.A Maryam Green, dalam Zulkifli 2012:73). Penandatanganan perjanjian yang bukan merupakan persetujuan untuk mengikatkan diri pada perjanjian tetap menimbulkan konsekuensi bagi negara-negara yang menerima naskah perjanjian berupa kewajiban moral (walaupun belum terikat apda perjanjian) untuk tidak melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan perjanjian (Eddy Damian, dalam Zulkifli 2012:73).

Persetujuan untuk terikat pada perjanjian dapat dilakukan dengan pertukaran dokumen/instrumen yang pada dasarnya merupakan perjanjian internasional (biasanya menggunakan instrumen *Exchange of Letter Notes, Agreed Minutes, Summary Record, Modus Vivendi, Memorandum of Understanding*, dan lain sebagainya).

Dalam hal ini negara-negara peserta menghendaki bahwa sejak dipertukarkannya instrumen/ dokumen tersebut, negara-negara telah mentakan terikat pada perjanjian. Cara pengikatan perjanjian dengan cara seperti ini pada umumnya dilakukan pada perjanjian-perjanjian sederhana yang menyangkut kerjasama dibidang ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, penghindaran pajak berganda, penanaman modal dan perjanjian-perjanjian bersifat teknis. Biasanya materinya bersifat prosedural dan memerlukan penerapan dalam waktu singkat tanpa mempengaruhi peraturan perundang-undangan nasional yang fundamental.

Persetujuan untuk terikat pada perjanjian dengan pertukaran instrumen dilakukan oleh organ pemerintah yang berwenang dari masing-masing pihak.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, wakil-wakil dari negara peserta, setelah mengadopsi ataupun mengotentikasi naskah perjanjian, harus menyampaikan naskah perjanjian itu kepada organ pemerintahnya yang berwenang. Itulah yang akan memutuskan apakah akan setuju untuk terikat pada perjanjian dengan cara pertukaran instrumen tentang pembentukan perjanjian itu.

#### 2.2.6. Pemberlakuan Perjanjian Internasional Secara Nasional

Berkaitan persetujuan perjanjian dengan memerlukan ratifikasi Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa suatu negara mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian internasional dengan syarat bahwa persetujuan yang demikian harus disahkan oleh badan yang berwenang dinegaranya. Penandatanganan oleh wakil atau utusan negara hanya bersifat sementara dan masih harus disahkan. Pengesahan oleh badan yang berwenang tersebut dinamakan dengan ratifikasi (I Wayan Parthiana dalam Zulkifli 2012:74), bertolak pada praktik yang demikian persoalan ratifikasi bukan hanya merupakan persoalan hukum tata negara. Hukum internasional sekedar mengatur dalam hal apa saja persetujuan yang diberikan suatu negara pada suatu perjanjian memerlukan ratifikasi. Adapun cara ratifikasi ini dilakukan semata-mata merupakan persoalan intern menurut ketentuan hukum tata negara masing-masing negara (Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. A Soes dalam Zulkifli 2012:74).

Pandangan ini sejalan dengan pemikiran bahwa ratifikasi mencakup dua prosedur yang terpisah namun saling terkait satu sama lain yaitu prosedur eksternal (berdasarkan hukum internasional) dan prosedur hukum internal (berdasarkan hukum nasional) (Damos Dumoli Agusman dalam Zulkifli

2012:75). Proses ratifikasi adalah pertukaran atau penyerahan instrumen ratifikasi. Dalam perjanjian bilateral biasanya dilakukan dengan pertukaran instrumen yang dibutuhkan antara dua negara yang bersangkutan, sedangkan dalam perjanjian multilateral, biasanya ditunjuk satu pihak yang mengumpulkan instrumen ratifikasi dari semua negara yang memberitahu kepada semua pihak mengenai keadaan itu.

Penandatanganan instrumen ratifikasi itu sendiri tentunya dilakukan atas nama negara. Dalam praktik internasional, penandatanganan dilakukan berdasarkan konstitusi atau praktik dimasing-masing negara yang lazimnya dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan atau menteri yang membidangi urusan luar negeri. ketiga organ tersebut disebut dengan nama *the Big Three*.

Pelaksanaan perjanjian internasional berdasarkan hukum internasional setelah suatu negara terikat pada perjanjian internasional melalui cara-cara sebagaimana disebutkan diatas, maka tahapan selanjtnya adalah kewajiban untuk melaksanakan perjanjian internasional tersebut. Pengesahan atau pelaksanaan perjanjian internasional adalah dua hal yang berkaitan erat satu sama lain. *Council of Europe* mencantumkan kewajiban untuk melaksanakan perjanjian internasional dalam definisi ratifikasi/pengesahan sebagai penegasan bahwa pengesahan dan pelaksanaan perjanjian merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap negara yang meratifikasi atau mengesahkan perjanjian internasional maka secara otomatis berkewajiban untuk menghormati dan melaksanakan ketentuan dalam perjanjian internasional tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu perjanjian internasional sah dan dapat dilaksanakan hanya apabila perjanjian itu didasarkan pada kebebasan para pihak untuk menyatakan kehendaknya (*free Consent*) (**Jan Klabbers dalam Zulkifli 2012:75**). Suatu perjanjian internasional yang disepakati oleh para pihak namun tidak didasarkan atas asas ini, misalnya karena ada tekanan ataupun paksaan dari pihak lain, akan dapat menimbulkan akibat hukum batalnya (*Void*) ataupun tidak sah-nya perjanjian tersebut (**I Wayan Parthiana dalam Zulkifli 2012:77**).

Hukum internasional juga tidak mengatur atau menentukan cara atau metode pemberlakuan perjanjian internasional dalam lingkup nasionalnya. Suatu negara diharuskan memenuhi kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian internasional yang sudah disahkan. Namun hukum internasional tidak mengatur dan menentukan bagaimana cara atau metode yang digunakan untuk mencapai tujuan ini dalam yurisdiksi domestik suatu negara. Setiap negara sepenuhnya diberikan kebebasan untuk menentukan cara atau metode yang dianggap sebagai yang terbaik (**Peter Malanczuk & Michael Barton dalam Zulkifli 2012:77**). Dalam hal ini dikenal berbagai metode yang berkembang seperti inkorporasi, transformasi, dan delegasi.

#### 2.2.7 Tujuan Kerjasama Luar Negeri

Ada banyak sekali tujuan kerjasama internasional. Adapun secara umum tujuan dari kerjasama internasional adalah mewujudkan perdamaian dunia serta kemakmuran dunia. Namun tujuan tersebut bisa dijabarkan kembali ke dalam tujuan yang lebih rinci. Adapun beberapa tujuan dari kerjasama internasional antara lain sebagai berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Memacu pertumbuhan ekonomi setiap negara
- b. Mewujudkan pengertian antar bangsa dalam membina dan menegakkan perdamaian dunia
- c. Menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyatnya
- d. Memperluas lapangan kerja
- e. Memperkuat rasa persahabatan

Selain pemaparan diatas, penulis memaparkan tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama luar negeri (**Koesnadi Karstasasmita dalam Zulkifli, 20:2012**) adalah untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya yang tidak dimilikinya didalam negeri. untuk itu, negara tersebut perlu memperjuangkan kepentingan nasionalnya diluar negeri. dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara.

#### 2.2.8 Syarat-Syarat Kerjasama Luar Negeri

Kerjasama internasional sekurang-kurangnya harus dimiliki dua syarat utama, yaitu pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing negara anggota yang terlibat. Tanpa adanya penghargaan tidak mungkin dapat dicapai kerjasama seperti yang diharapkan semula. Kedua, adanya keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi daripada komitmen (**Sjamsuar dan Riswandi dalam Zulkifli, 19:2012**).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2.3 Pemerintah Daerah

### 2.3.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian Pemerintah Daerah menurut Pasal 1 Ayat (3) UU No. 23 Tahun 2014 adalah kepala daerah sebagai penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin dalam pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi suatu kewenangan daerah otonom. Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintah daerah lainnya. Hubungan ini meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilakukan secara adil selaras.

Menurut pasal 1 angka (2) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.

Undang-undang dasar 1945 pasca-amandemen itu mengatur mengenai pemerintahan daerah dalam bab VI, yaitu pasal 18, pasal 18A, dan pasal 18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam pasal 18 untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang, pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada pasal 18 ayat (5) tertulis, “pemerintahan daerah menjalankan otonomi



seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Pasal 18 ayat (6) menyatakan,” pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah , pemerintah daerah boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan pemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-undang pemerintahan pusat.

Siswanto Sunarno (2009:8) berpendapat bahwa konsep pemikiran tentang otonomi daerah mengandung pemaknaan terhadap eksistensi otonomi tersebut terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemikiran-pemikiran tersebut antara lain: *Pemikiran pertama*, bahwa prinsip otonomi daerah dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya ini mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. *Pemikiran kedua*, bahwa prinsip untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

### 2.3.2. Daerah dan Kewenangan Hubungan Luar Negeri

Kewenangan daerah untuk melaksanakan hubungan luar negeri untuk tidak bisa dilepaskan dari Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang revisi atas Undang No. 22 Tahun 1999. Dalam kedua undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan yang secara eksplisit mengakui kewenangan daerah untuk itu. Kewenangan daerah dalam melaksanakan hubungan luar negeri meliputi berbagai aspek yang cukup luas. Mulai dari penanaman modal, perdagangan luar negeri, turisme atau pariwisata, pendidikan, keuangan sampai bidang-bidang lain yang tergolong cukup penting seperti persoalan pembangunan yang lebih meluas.

Singkatnya selama kerjasama tersebut tidak bersentuhan dengan persoalan mengenai: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter, dan fiscal nasional dan agama. Semua bentuk kerjasama dimungkinkan. Penjelasan lebih lanjut mengenai cakupan kewenangan Provinsi untuk melakukan hubungan luar negeri dapat ditemukan dalam Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh pemerintah Daerah.

Didalam buku panduan tersebut, dinyatakan berbagai bentuk kerjasama yang dimungkinkan meliputi : (1) kerjasama ekonomi: (a) perdagangan; (b) investasi; (c) ketenagakerjaan; (d) kelautan dan perikanan; (e) ilmu pengetahuan

dan teknologi; (f) kehutanan; (g) pertanian; (h) pertambangan; (i) Kependudukan; (j) Pariwisata; (k) Lingkungan Hidup; dan (l) perhubungan. (2) Kerjasama Sosial Budaya: (a). Pendidikan; (b) Kesehatan; (c) Kepemudaan; (d) Kewanitaan; (e) Olahraga; dan (f) Kesenian. (3) Bentuk Kerjasama Lain.

Lebih lanjut panduan menegaskan posisi Departemen Luar Negeri sebagai Koordinator yang memiliki kewenangan untuk memberikan saran dan pertimbangan politis/ yuridis terhadap program kerjasama Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut:

- a. Harus dengan Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatic dan dalam kerangka Negara kesatuan;
- b. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- c. Adanya persetujuan dari DPRD;
- d. Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;
- e. Tidak melanggar prinsip non-intervensi
- f. Berdasarkan persamaan hal
- g. Berdasarkan prinsip persamaan kedudukan; dan
- h. Mendukung penyelenggaraan pemerintahan

Kemudian panduan menambahkan bahwa kerjasama luar negeri haruslah: tidak bertentangan dengan politik dan kebijakan luar negeri pemerintah pusat; tidak mengancam keamanan domestic; secara legal tidak terdapat kemungkinan-kemungkinan yang dapat mengakibatkan kerugian-kerugian; dan tidak bertentangan dengan kebijakan departemen teknis terkait.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 23.3 Hukum Indonesia terkait Kerjasama Kota/Provinsi Kembar

Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri memberikan batasan bahwa Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regionala dan internasional yang dilakukan oleh pemerintah ditingkat pusat dan daerah. Dapat dikatakan atau jelaslah bahwa kewenangan untuk melakukan hubungan luar negeri tidak hanya dapat dilakukan oleh pemerintah pusat namun juga oleh pemerintah daerah. Namun demikian, adanya keharusan penyelenggaraan hubungan luar negeri yang baik pemerintah maupun non pemerintah agar sesuai denga politik luar negeri Republik Indonesia.

Secara teknis, ketentuan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan kerjasama internasional, Undang-undang nomor 24 tahun 2000 pasal 5 ayat (1) kerjasama sebagai berikut:

Lembaga negara dan lembaga pemerintah, baik departemen maupun non-departemen ditingkat pusat dan daerah, mempunyai rencana untuk membuat perjanjian internasional, terlebih dahulu melakukan konsultasi dan koordinasi mengenai rencana tersebut dengan menteri.

Selain itu, ketentuan pasal 7 undang-undang ini sejalan dengan ketentuan internasional yakni Konvensi Jenewa 1969, yang mensyaratkan adanya surat kuasa apabila seseorang mewakili Pemerintah Republik Indonesia yang bertujuan untuk menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian atau mengikatkan diri apda perjanjian internasional memerlukan surat kuasa lebih dikenal dengan sebutan *Full Powers*. Disamping itu dengan adanya penerbitan surat kuasa (*full*

power) oleh menteri luar negeri makin menegaskan posisi penandatanganan sebagai salah satu pejabat ditingkat pusat. Oleh karena nya, dalam konteks hubungan luar negeri, daerah tidak dapat dipandang sebagai representasi dirinya sendiri. Tapi, daerah harus dipandang sebagaimana layaknya negara yang merupakan subjek hukum internasional (Jawahir Thontowi ‘’ Jurnal Hukum No.2 Vol.16 Tahun 2009:149-168).

Berkaitan dengan kerjasama luar negeri yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah juga dapat dilihat pada pasal 42 ayat (1) huruf f dan g menjadi isyarat agar pemerintah daerah dapat mengadakan perjanjian internasional dan kerjasama internasional, dengan adanya peran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memberikan pendapat, pertimbangan dan persetujuannya. Sebagaimana pada bagian penjelasan dari pasal 42 ayat (1) huruf f bahwa yang dimaksud dengan pihak luar negeri yang terkait dengan kepentingan daerah.

Selanjutnya penjelasan pasal yang sama dari huruf g dapat diketahui pula, bahwa kerjasama internasional dalam ketentuan ini adalah kerjasama daerah dengan pihak luar negeri didalamnya meliputi kerjasama Kabupaten/kota kembar, kerjasama teknik termasuk bantuan kemanusiaan, kerjasama penerusan pinjaman/hibah, kerjasama penyertaan modal dan kerjasama lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. Sebelumnya, terkait peran pemerintah pusat yang menjalankan pemerintah dalam kepentingan pemerintah daerah sebagaimana tercantum pula pada penjelasan undang-undang Nomor 32 tahun 2004, poin 4 pemerintah daerah, bahwa Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pula selaku wakil Pemerintah di Daerah dalam pengertian untuk menjembatani atau memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata Pemerintahan Kabupaten dan Kota.

Memperhatikan dari ketentuan yang ada dari ketiga undang-undang diatas dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diuraikan bahwa kewenangan pemerintah daerah dalam membuat perjanjian internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak dapat semata-mata diselenggarakan berdasarkan kepentingan daerah. Pemerintah daerah dalam membuat perjanjian internasional adalah atas nama pemerintah pusat sehingga merupakan kerjasama internasional yang dilakukan oleh negara Republik Indonesia.

Disamping itu, perlu diperhatikan pula persoalan hukum lainnya yaitu apakah negara yang merupakan mitra kerjasama dari negara tetangga juga menggunakan *full power*, karena menurut pakar hukum internasional Universitas Indonesia Prof. Hikmahanto Juwana (dalam Zulkifli, 2012:83), mengatakan bahwa apabila dalam kerjasama internasional yang melibatkan pemerintah daerah dengan kota atau pemerintah daerah dinegara lain memperoleh *full power* dari negaranya maka hal itu tidak menjadi persoalan jika pemerintah RI memberikan *full power* juga kepada pejabat daerah. Akan tetapi, dalam hal pemerintah lokal negara mitra kerjasama internasional daerah tersebut tidak menggunakan *full power* maka selayaknya pemerintah Indonesia menempatkan diri pada posisi yang seajar. Dengan demikian kerjasama internasional yang dilakukan pemerintah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



daerah tersebut hanya berupa perjanjian perdata internasional sebagaimana biasa dalam hal itu dilakukan.

### 2.3.4 Aspek Hukum Internasional dalam Pelaksanaan Kerjasama Kota/Provinsi Kembar

Memahami dari aspek hukum internasional, negara dalam berbagai fakta tetap menjadi subyek utama dalam hukum internasional walaupun perkembangan hukum internasional yang sangat signifikan terlihat dari peran berbagai subjek hukum internasional bukan negara (*non state actors*) (Martin Hollins dan Steve Smith dalam Zulkifli 2012:83). Fakta yang mendukung negara sebagai subjek utama hukum internasional, selain secara historis memang ditujukan untuk mengatur hubungan antar bangsa (negara), juga negaralah yang memiliki supremasi atas wilayahnya masing-masing.

Untuk memahami secara teknis, sebagaimana Kementerian Luar Negeri yang merupakan pelaksana hubungan luar negeri Republik Indonesia telah menerbitkan sebuah buku panduan umum mengenai tata cara hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah supaya terjaga kerjasama antara Pemerintah Daerah dan pihak Asing tetap saling menguntungkan dan berada dalam Koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa tujuan penyusunan panduannya adalah:

Untuk memberi arah. Membantu dan memfasilitasi daerah dalam melakukan hubungan dan kerjasama luar negeri, guna menunjang pembangunan daerah serta mewujudkan kebijakan “*One Door Policy*” dalam hubungan Dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerjasama Luar Negeri Indonesia dan untuk mencegah timbulnya masalah dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah dan pihak asing.

Dalam panduan tersebut, Kementerian Luar Negeri memberikan arahan tentang kerjasama luar negeri yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Kaidah-kaidah dasar yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan hubungan kerjasama luar negeri tersebut adalah sebagai berikut (Departemen Luar Negeri, ‘‘*Panduan Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*, revisi I, Jakarta, 2006, hal 6) :

- a. Setiap kerjasama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagai perwujudan kewenangan yang diatur dalam undang-undnag nomor 32 tahun 2004 wajib dikonsultasikan dan di koordinasikan dengan menteri;
- b. Hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah harus dilaksanakan sesuai dengan politik Luar Negeri;
- c. Pemerintah Dearah tidak diperkanankan untuk membuka perwakilan sendiri; Kementerian Luar Negeri sebagai koordiantor penyelenggaraan hubungan dan kerjasama luar negeri memberikan saran dan pertimbangan politis/yuridis terhadap program kerjasama luar negeri yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Sementara departemen teknis memberikan saran dan pertimbangan mengenai materi dan substansi program kerjasama.

Mekanisme ini merupakan acuan umum bagi setiap kerjasama Ekonomi dan Kerjasama Sosial Budaya yang dilaksanakan oleh Daerah dengan pihak asing termasuk kerjasama perbatasan oleh Pemerintah Daerah yang berbatasan dengan wilayah negara asing (*border crossing, border trade and*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*transportation*). Namun hal ini tidak berlaku bagi bidang-bidang yang dicakup dalam wadah: komisi bersama (*joint commision*), forum konsultasi bilateral (*Billateral Consultations*), komite berama mengenai perbatasan (*Joint Border Committee*) dan promosi terpadu serta kerjasama Ekonomi Sub-Regional (KESR).

Pada prinsipnya pemerintah daerah dilarang melakukan pinjaman langsung kepada pihak luar negeri. pemerintah Daerah dapat mengajukan usulan kegiatan investasi untuk mendapatkan penerusan pinjaman luar negeri dari pemerintah pusat melalui Departemen Keuangan dan Bappenas. Kerjasama luar negeri dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia dan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b) Sesuai dengan bidang kewenangan Pemerintah Daerah yang diatur dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004;
- c) Mendapat persetujuan dari DPRD;
- d) Tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri;
- e) Tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing negara;
- f) Berdasarkan asas persamaan hak dan tidak saling memaksakan kehendak;
- g) Memperhatikan prinsip persamaan kedudukan, memberikan manfaat dan saling menguntungkan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- h) Mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan nasional dan daerah serta pemberdayaan masyarakat.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pelaksanaan kerjasama luar negeri harus aman dari berbagai segi, yaitu:

- a) Politis : tidak bertentangan dengan Politik Luar Negeri dan kebijakan Hubungan Luar Negeri Pemerintah pusat pada umumnya;
- b) Keamanan : kerjasama luar negeri tidak digunakan atau disalahgunakan sebagai akses atau kedok bagi kegiatan asing (*Spionase*) yang dapat mengganggu atau mengancam stabilitas atau keamanan dalam negeri;
- c) Yuridis : terdapat jaminan kepastian hukum yang secara maksimal dapat menutup celah-celah (*loopholes*) yang merugikan bagi pencapaian tujuan kerjasama.
- d) Teknis : tidak bertentangan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Departemen teknis terkait.

Sebagaimana panduan kerjasama luar negeri terkait mekanisme umum hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah yang diterbitkan oleh Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Kementerian Luar Negeri (saat ini Kementerian Luar Negeri) bahwa mengharuskan penyelenggaraannya sesuai dengan politik Luar Negeri. sesuai Konvensi Wina Tahun 1963 mengenai hubungan Konsuler, diluar negeri hanya dikenal Perwakilan Republik Indonesia yang melayani kepentingan negara Republik Indonesia termasuk Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah tidak dibenarkan membuka perwakilan tersendiri Departemen Luar negeri 'Panduan Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, revisi I, Jakarta, 2006:18).



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun bidang-bidang hubungan dan kerjasama luar negeri oleh Daerah yang memerlukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri antara lain sebagai berikut:

#### Kerjasama Ekonomi

- a) Perdagangan
- b) Investasi
- c) ketenagakerjaan
- d) Kelautan dan perikanan
- e) Ilmu pengetahuan dan teknologi
- f) Kehutanan
- g) Pertanian
- h) Pertambangan
- i) Kependudukan
- j) Pariwisata
- k) Lingkungan hidup dan
- l) Perhubungan.

#### Kerjasama Sosial Budaya

- a) Pendidikan;
- b) Kesehatan;
- c) Kepemudaan;
- d) Kewanitaan;
- e) Olahraga; dan
- f) Kesenian.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Bentuk Kerjasama Lain

Keadaan yang tertib dan aman dalam menjalin hubungan internasional antar negara satu dengan negara lainnya maupun pihak selain negara sekalipun untuk tercapainya tujuan merupakan suatu keniscayaan, maka sebagai landasan suatu hubungan kerjasama, maka diperlukannya serangkaian ketentuan untuk sehingga pihak yang mengadakan kerjasama internasional tersebut merasa aman menjalaninya.

Terkait dengan mekanisme yang menjadi prosedur dari pelaksanaan kerjasama internasional antar kota atau di Indonesia dikenal dengan kerjasama kota kembar adalah sebagai berikut:

- a. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah diluar negeri (*Sister Province/Sister City*) dilakukan dengan negara yang memiliki hubungan diplomatik negara Republik Indonesia, tidak mengganggu stabilitas politik dan keamanan dalam negeri, dan berdasarkan apda prinsip menghormati Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, persamaan kedudukan, tidak memaksakan kehendak, memberikan manfaat dan saling menguntungkan serta tidak mengarah pada campur tangan urusan dalam negeri masing-masing.

Pemerintah Daerah yang berminat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Kota/ Provinsi diluar negeri memberitahukan kepada Kementerian Luar Negeri, Departemen Luar Negeri dan instansi terkait untuk mendapat pertimbangan.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemerintah Daerah bersama dengan Kementerian Luar Negeri melalui perwakilan RI diluar negeri mengadakan penjajakan untuk mengetahui apakah minatnya tersebut mendapat tanggapan positif dari Pemerintah Kota/Provinsi di Luar Negeri.

Dalam hal terdapat tanggapan positif dari kedua pemerintah daerah mengenai rencana kerjasama, maka kedua Pemerintah Daerah, jika diperlukan dapat menyiapkan penandatanganan kesepakatan diawal dalam bentuk *Letter of Intent (LoI)*.

*Letter of Intent (LoI)* dapat disiapkan oleh Pemerintah Daerah, Kementerian Luar Negeri atau Perwakilan RI di Luar Negeri untuk disampaikan dan dimintakan tanggapan kepada mitra asing diluar negeri.

f. Naskah LoI yang disepakati bersama, dapat ditandatangani oleh Pimpinan atau pejabat setingkat dari kedua Pemerintah Daerah.

g. Sebagai tindak lanjut dari LoI, kedua pihak dapat bersepakat untuk melembagakan kerjasama dengan menyiapkan naskah *Memorandum of Understanding (MoU)*.

Pembuatan MoU sebagai salah satu bentuk perjanjian internasional dilakukan menurut mekanisme sebagaimana tertuang dalam Bab X panduan ini.

Rancangan naskah MoU dapat memuat bidang kerjasama dengan memperhatikan pula aturan tentang pemberian visa, izin tinggal, perpajakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal para pihak sepakat untuk melakukan penandatanganan terhadap MoU tersebut, selanjutnya dapat dimintakan surat kuasa (*full powers*) kepada Menteri Luar Negeri.

Naskah asli *Letter of Intent (LoI)* dan *Memorandum of Understanding (MoU)* Kerjasama *Sister Province/Sister City* yang telah ditandatangani oleh kedua pihak diserahkan kepada Kementerian Luar Negeri c.q. Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, untuk disimpan diruang perjanjian (*treaty room*).

Selanjutnya Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya akan membuatkan salinan naskah resmi (*certified true copy*) untuk kepentingan arsip Pemerintah Daerah.

## 2.4 Pendidikan

### 2.4.1 Pengertian Pendidikan

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Menurut kamus besar bahasa indonesia pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan; proses, cara dan pembuatan mendidik.

Menurut Iman Al-Ghazali, mendefinisikan pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia sejak masa kejadiannya sampai akhir hayatnya melalui berbagai ilmu pengetahuan yang disampaikan dalam bentuk pengajaran secara bertahap, dimana tanggung jawab orang tua dan masyarakat menuju pendekatan diri kepada Allah SWT sehingga menjadi manusia sempurna.

Menurut Notoadmodjo (2003:16), mendefinisikan bahwa Pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan untuk mempengaruhi orang lain baik individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.

Dalam hal ini tak terkecuali pendidikan perguruan tinggi juga mendapat perhatian dan perlakuan sama dalam membantu meringankan beban pemerintah untuk mewujudkan pembangunan manusia yang lebih maju dalam hal pemikiran serta daya saingnya dengan masyarakat luar. Ini tertuang pada pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa perguruan tinggi harus mampu memberdayakan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat Melalui Tri Dharma Pendidikan Tinggi.

## 2.5. Beasiswa

### 2.5.1. Pengertian Beasiswa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengemukakan bahwa beasiswa adalah tunjangan uang yang diberikan kepada pelajar atau mahasiswa sebagai bantuan biaya belajar.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Murniasih (2009) mengemukakan beasiswa adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Penghargaan tersebut bisa berbentuk akses tertentu pada suatu instansi atau penghargaan berupa bantuan keuangan.

Lathina (2009), mengemukakan bahwa beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh. Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pendidikan, perusahaan, ataupun yayasan.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

No	Judul	Peneliti	Hasil
1	Kewenangan Daerah Dalam Melaksanakan Hubungan Luar Negeri (Studi Kasus di Propinsi Jawa Barat dan DIY )	Jawahir Thontowi Jurnal Hukum No.2, Vol.16, 2009) (fakultas hukum Universitas Islam Indonesia,Yogyakarta)	Meskipun daerah dapat melakukan kerjasama luar negeri , Tetapi lebih merupakan perpanjangan tangan kekuasaan negara, dari pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
	Substansi Kerjasama Luar Negeri <i>Sister City</i> Kota Surabaya-Xiamen	Irdyanti Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.17 No.1, 2014 (fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau)	Otonomi Daerah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi daerah untuk melakukan pengembangan kerjasama luar negeri. Tren kerjasama kota kembar ( <i>sister city</i> ) disebabkan oleh adanya ketergantungan dan kepentingan antar daerah otonom

3	Implementasi Kebijakan Kerjasama Luar Negeri <i>Sister Province</i> Di Provinsi Jawa Tengah	Masrohatun Jurnal SAWALA Vol 6 No.1, April 2018, 49-62 p-ISSN 2302-2231 e-ISSN 2598-4039	bertetangga.  Pelaksanaan sister province di Provinsi Jateng kurang maksimal. Dikarenakan masih minimnya program kerjasama yang belum terealisasi. Beberapa sister kurang disiplin dalam menaati MoU yang disepakati. Beberapa dinas belum menindaklanjuti program kerjasama dengan program yang lebih teknis. Selain itu sebagian penguasaan bahasa asing. Banyaknya dinas yang terlibat menyulitkan para implementator dalam koordinasi
---	---	---	---

## 2.7 Definisi Konsep

### a. Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan menurut **Wahab (1997:63)**, adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat, atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Berdasarkan pendapat diatas, penulis menyimpulkan bahwa implementasi adalah segala bentuk pelaksanaan atau penerapan apa-apa tindakan yang dilakukan oleh pejabat publik, atau aktor pengambil kebijakan yang diwujudkan dalam bentuk keputusan kebijakan.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Kebijakan publik

Menurut **Easton (1969)** adalah pengalokasian nilai-nilai kekuasaan untuk seluruh masyarakat yang keberadaannya mengikat. Menurut Edward mengatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah termasuk kebijakan publik.

Berdasarkan pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan publik adalah segala tindakan yang diambil atau dibuat oleh pemerintah dalam rangka menyelesaikan permasalahan publik yang sifatnya mengikat yang dilakukan dan disahkan oleh pemerintah.

### c. Pemerintah Daerah

Berdasarkan undang-undang Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah menurut asas otonom dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pendapat diatas penulis menyimpulkan bahwa pemerintah daerah adalah seperangkat aktor penyelenggara pemerintahan daerah, baik itu kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan berdasarkan daerah otonom.

### d. Kebijakan Luar Negeri

Menurut Mark R. Armsutz (dalam Aleksius Jemadu: 64) mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai tindakan atau kebijakan pemerintah, pencapaian



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan nasional dan jangkauan kebijakan luar negeri yang melewati batas kewilayahan negara.

Sedangkan menurut Kegley dan Wittkopf (dalam Aleksius Jemadu :65) mengatakan bahwa kebijakan luar negeri sebagai kewenangan otoritas keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang didasari dengan memperhatikan nilai-nilai yang mendasari perumusan tujuan suatu negara serta alat untuk mencapai tujuan tersebut.

#### Hubungan internasional

**Robert Jackson dan Georg Sorensen (2014: 4)** dalam bukunya, *Pengantar Studi Hubungan Internasional Teori Dan Pendekatannya* menyatakan definisi Hubungan Internasional sebagai berikut:

“Hubungan internasional adalah studi hubungan dan interaksi antara negara-negara, termasuk aktivitas dan kebijakan pemerintah, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, dan perusahaan multinasional. Hubungan internasional dapat berupa subjek teoritis atau subjek praktis atau subjek kebijakan, dan pendekatan akademis terhadapnya dapat bersifat empiris atau normatif atau keduanya”.

#### Indikator Penelitian

Berdasarkan teori George Edward III tentang Faktor-Faktor keberhasilan implementasi kebijakan ada 4 (empat) yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel 2.2**  
**Indikator Penelitian**

Referensi	Indikator	Sub Indikator
Teori Edward H. Subarsono, (dalam Subarsono, 2011: 90-92)	Komunikasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Transmisi</b> kebijakan dilakukan melalui sosialisasi kepada seluruh badan-badan dinas selingkungan kab.siak dan disebarkan juga menggunakan media massa dan elektronik</li> <li>b. Koordinasi dalam pemberian informasi berjalan baik dan harus mengandung <b>kejelasan</b> agar maksud dan tujuan dari kebijakan tersebut dapat dipahami dan direalisasikan dengan baik.</li> <li>c. teknik pengsosialisasian yang telah tersampaikan kepada <i>implementor</i> akan menghasilkan <b>konsistensi</b> menyukeseikan kebijakan ini.</li> </ol>
	Sumberdaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan dan penyelesaian tugas dilakukan oleh <b>staf</b> atau tenaga profesional dalam melakukan agenda kerjasama luar negeri</li> <li>b. Memaksimalkan pemberian <b>informasi</b> kebijakan sebaagi petunjuk pelaksanaan kebijakan</li> <li>c. Memanfaatkan <b>wewenang</b> yang dimiliki dengan melakukan penyediaan sarana dan prasarana dengan anggaran yang cukup dan memadai</li> <li>d. <b>Finansial</b>, ketersediaan anggaran yan g memadai merupakan kunci utama dalam menentukan keberhasilan program ini.</li> </ol>
	Disposisi	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. informasi atau pernah terlibat langsung kebijakan kerjasama luar negeri</li> <li>b. Pemberian reward baik berupa penghargaan secara moril atau pun pemberian <b>insentif</b> sebagai motivasi kerja sesuai dengan</li> </ol>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		peraturan oerundang-undangan. c. Memiliki respon positif/baik terhadap kebijakan pemerintah.
	Struktur birokrasi	a. adanya profesionalisme dalam bekerja serta pemahaman yang memadai dalam bekerja, artinya secara formalitas memiliki <b>SOP</b> dalam penegakkan disiplin peserta dalam pengumpulan berkas pendaftaran sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku b. <b>fragmentasi atau tanggungjawab</b> struktur yang tertinggi adalah kepala daerah, dalam kasus ini Bupati Siak yang harus berani mengambil sikap dalam bentuk kebijakan dan menghadapi apabila didapatkan kegagalan ditengah perjalanan kerjasama. c. pejabat yang berkepentingan terhadap aturan tersebut memberikan perannya dengan rasa <b>tanggungjawab</b> demi tercapainya tujuan kebijakan.

*Sumber : Subarsono, 2011:90-92*



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pengertian kualitatif menurut **Sugiyono (2005:1)**, adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek ilmiah, sebagai lawannya adalah eksperimen, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.

Suatu penelitian yang berusaha menjawab dan menganalisa bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University-Jepang).

#### 3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Tempat yang digunakan sebagai objek penelitian ini adalah BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah), BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Siak, dengan jadwal penelitian dimulai dari 08 Januari - 19 September 2019.

#### 3.3 Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Adapun jenis data penulis gunakan adalah data kualitatif. Dalam buku **Sugiyono (2003:14)** penelitian kualitatif adalah data yang berbentuk data, kalimat, skema, dan gambar, yang menggambarkan atau melakukan secara

sistematis, aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan yang diselidiki peneliti dalam hal ini mengumpulkan data berupa cerita rinci dari informan.

### **Sumber Data**

Penelitian merupakan aktivitas ilmiah yang sistematis, terarah dan bertujuan, maka data yang di kumpulkan relevan dengan permasalahan yang di hadapi. Untuk memperoleh data yang akurat dan komprehensif, maka penulis mendapatkan data dan informasi dari berbagai sumber sebagai berikut:

- a) Data Primer, adalah data yang di peroleh secara langsung dari sumbernya, penulis memperoleh secara langsung dari responden melalui wawancara tidak terstruktur.
- b) Data Sekunder, adalah data yang di peroleh dari teori, laporan-laporan, buku-buku, dan pendapat para ahli tentang kegagalan kebijakan luar negeri pemerintah daerah Siak dibidang pendidikan.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting, karena data yang di kumpulkan akan di gunakan untuk pemecah masalah yang sedang di teliti. Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang di perlukan. Proses pengumpulan data secara umum dalam suatu penelitian adalah: yang digunakan dalam penelitian ini menghimpun data dan informasi adalah wawancara data dan informasi adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a) Dokumentasi

Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan cara meminta dokumen yang berkaitan dengan implementasi kebijakan kerjasama luar negeri pemerintah daerah Kabupaten Siak. Dalam hal ini yang penulis lakukan adalah dengan cara meminta dokumen yang berisi data-data yang penulis butuhkan, dari kantor BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ) dan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) Kabupaten Siak yaitu data-data yang dapat mendukung didalam memberikan jawaban atas hasil penelitian.

#### b) Wawancara

Peneliti dalam hal ini melakukan tanya jawab langsung kepada kepala Badan, kepada sub bidang Kerjasama Daerah, BAPPEDA (Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah) Kabupaten Siak, selanjutnya penulis juga mewawancarai Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur, Kepala Sub Bidang Diklat BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ) Kabupaten Siak, serta seorang Kepala Kantor Urusan Internasional dan Kerjasama Universitas Islam Riau, yang bertugas sebagai saksi dan sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjalin komunikasi dengan pihak Chiba University, serta beberapa peserta yang lolos dan tidak lolos dalam mengikuti hasil seleksi penerimaan mahasiswa baru Chiba University tahun 2018.

Wawancara yang di laksanakan oleh peneliti bersifat tidak terstruktur, dimana wawancara bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dapat



ubah pada saat wawancara di sesuaikan dengan kebutuhan peneliti mengenai hal-hal yang ingin dan perlu diketahui peneliti guna melengkapi data-data yang dibutuhkan.

### c. Observasi

Penelitian ini melakukan pengamatan langsung ke lapangan sebagai riset untuk mendapatkan data-data tentang implementasi kebijakan kerjasama luar negeri oleh pemerintah Kabupaten Siak.

### 3.5 Informasi Peneliti

Informasi peneliti adalah orang di manfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian (Moloeng 2000:97). Informan merupakan orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan di teliti. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Dalam penelitian ini di gunakan teknik purposive sampling. Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Table 3.1**  
**Jumlah Key Informan Penelitian Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (study kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University).**

No	JABATAN	NAMA
1	Kepala Dinas Bidang Penelitian dan pengembangan Kabupaten Siak.	H.M. Agung Apandi, S.STP, M.Si (NIP: 19850802 200412 1 001)
2	Kepala Sub Bidang (Kasubid) Kerjasama Daerah Kabupaten Siak	Muhammad Faisal Harahap, ST (NIP: 19831007 200903 1 007)
3	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak	Ichwan Zulfitra, SE., M.Si (NIP: 19691225 200501 1 008)
4	Kepala Sub Bidang Diklat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak	Jon Kenedi, S.A.P (NIP: 19851119 200604 1 001)
5	Kepala Kantor Urusan Internasional dan	Dr. Husnul Kausarian, M.Sc

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

	Kerjasama Universitas Islam Riau	(NIDN: 1014028602)
	Peserta yang lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru universitas Chiba Jepang tahun 2018	Ulva Elviani, S.Kom
	Peserta yang lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru universitas Chiba Jepang tahun 2018	Ns. Rhomadona Adiaka Dwi Putra, S.Kep
	Peserta yang lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru universitas Chiba Jepang tahun 2018	Karimansyah Putra, ST
	Peserta yang lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru universitas Chiba Jepang tahun 2018	Jehan Alkausar, ST
10	Peserta yang tidak lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru universitas Chiba Jepang tahun 2018	Muhammad Yasin, S.Pd
11	Peserta yang tidak lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru universitas Chiba Jepang tahun 2018	Annisa Auliya, S.Pd
12	Peserta yang tidak lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru universitas Chiba Jepang tahun 2018	Yultika Amelia Efendi, S.Kom
	Peserta yang tidak lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru universitas Chiba Jepang tahun 2018	Santi Pradila Sandi, M.Pd
	Peserta yang tidak lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru universitas Chiba Jepang tahun 2018	Nevvi Wibella, S.T.P
<b>Total Keseluruhan</b>		<b>14 orang</b>

Sumber : Olahan Penulis, 2019

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3.6 Metode Analisa Data

Metode analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. **(Bogdan dalam Sugiyono 2013:224).**

Dalam penulisan skripsi ini, menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu mengumpulkan data secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang. Metode kualitatif ini dimaksudkan agar memperoleh gambaran keadaan dan data secara sistematis tentang berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian.

Dalam menganalisis data penulis menggunakan 4 langkah yaitu *pertama*, pengumpulan data, dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi yang akan penulis lakukan dengan cara datang langsung kelokasi tempat penelitian. Kemudian, *kedua*, reduksi data yaitu proses seleksi dari data yang diperoleh di lokasi. Selanjutnya, *ketiga* penyajian data yaitu sekumpulan yang tersusun yang memungkinkan adanya penarikan dan pengambilan tindakan. Penyajian data diperoleh dari keterkaitan kegiatan dan tabel. Dan langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan yaitu dalam pengumpulan data yan telah penulis lakukan sebelumnya maka ditarik kesimpulan denga cara menganalisa dari data-data yang ada sehingga dapat menjawab permasalahan yang penulis teliti **(Miles dan Huberman dalam Ali:2005).**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Siak

##### 4.1.1 Peta Kabupaten Siak



**Gambar 4.1 Peta Kabupaten Siak**

Kabupaten Siak merupakan bekas kerajaan Siak yang berdiri pada tahun 1723, Kabupaten Siak terbentuk melalui UU Nomor 53 Tahun 1999 tanggal 12 Oktober 1999 yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Sultan Siak pertama merupakan keturunan Raja Johor Sultan Mahmud Syah II. Kerajaan Siak selama berdirinya, diperintah oleh 12 orang sultan.

#### 4.2 Visi dan Misi

Visi dan misi jangka panjang dua puluh tahun kedepan Kabupaten Siak telah disepakati dengan ditetapkannya Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Siak Tahun 2005-2025. Visi dan Misi jangka panjang hanya dapat dicapai secara bertahap melalui beberapa “Visi dan Misi antara”, yakni Visi dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misi jangka menengah lima tahunan, yang akan ditetapkan pemangku jabatan Bupati selama periode jabatannya. Visi dan misi jangka menengah lima tahunan ini, mencerminkan prioritas pembangunan Kabupaten Siak pada periode tersebut, dalam rangka mencapai visi dan misi jangka panjang Kabupaten Siak. Visi dan misi jangka panjang ini dirumuskan berdasarkan informasi teknis, yang diperoleh dan analisis kondisi umum daerah yang berlaku saat ini, dan prediksi kondisi umum daerah diperkirakan akan berlaku dimasa mendatang.

#### 4.2.1 Visi Kabupaten Siak

Sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Jangka Panjang Daerah, maka visi pembangunan Kabupaten Siak Tahun 2005-2025 adalah:” *Pusat Budaya Melayu di Riau yang didukung oleh agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju dalam lingkungan masyarakat yang agamis dan sejahtera pada tahun 2025*” Untuk mewujudkan visi jangka panjang tersebut pemerintah tertinggi Kabupaten Siak telah menetapkan visi jangka panjang 2006-2011, yaitu: *Terwujudnya kesejahteraan rakyat yang lebih merata dan terbentuknya landasan yang kuat menuju Kabupaten Siak sebagai pusat budaya melayu di Riau yang didukung agribisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju*”.

Visi jangka menengah diatas merupakan visi periode lima tahun pertama, 2006-2011, dan periode pembangunan jangka panjang dua puluh lima tahunan Kabupaten Siak. Visi, mencerminkan bahwa titik berat pembangunan lima tahun pertama Kabupaten Siak adalah pemerataan kesejahteraan dan peningkatan kemampuan ekonomi pada sumber daya alam yang dapat diperbaharui dengan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengutamakan agroindustri sebagai lokomotif ekonomi. Hasil-hasil pembangunan empat periode lima tahunan berikutnya.

Visi jangka menengah lima tahunan Kabupaten Siak, dilandasi oleh analisis kondisi umum daerah yang terjadi pada lima tahun terakhir dan rediksi kondisi umum Kabupaten Siak lima tahun kedepan sebagai berikut:

1. Adanya tekanan yang mulai meningkat terhadap terhadap Kondisi Geomorfologi dan lingkungan hidup Kabupaten Siak saat ini, akibat pertumbuhan penduduk dan persaingan untuk mendapatkan sumber daya lahan, sumber daya air dan sumber daya lainnya. Diprediksikan dimasa depan tekanan terhadap lingkungan hidup akan semakin berat, sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk Kabupaten Siak. Untuk itu diharapkan misi-misi yang dicanangkan dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi dampak negatif kecenderungan masa depan tersebut.
2. Adanya berbagai permasalahan Demografi Kabupaten Siak saat ini, terutama permasalahan tidak meratanya kepadatan penduduk, tidak meratanya kesejahteraan rakyat, jumlah angkatan kerja, dan jumlah pencari kerja yang meningkat terus dari tahun ke tahun. Prediksi kondisi demografi dimasa mendatang mengindikasikan adanya peningkatan intensitas terhadap permasalahan-permasalahan demografis tersebut. Dalam hal ini, diharapkan misi-misi yang dicanangkan dapat mengatasi atau setidaknya mengurangi dampak negatif kecenderungan masa depan tersebut.
3. Nilai-nilai dan norma-norma budaya Melayu melekat pada Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak, karena itu pengembangannya hendaknya sejalan



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan budaya Melayu dilaksanakan bersamaan dengan pengembangan sumber daya manusia, yakni sejak usia dini kepada anak-anak di Kabupaten Siak, melalui muatan lokal dalam kurikulum pendidikan usia dini, pendidikan dasar pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

4. Adanya kondisi ekonomi dan sumber daya alam Kabupaten Siak saat ini, yang mengerucut pada struktur ekonomi tertentu, yaitu struktur ekonomi yang bertumpu pada sektor Primer yang didominasi oleh lapangan usaha pertambangan. Diperlukan perubahan struktur ekonomi yang lebih menjamin kesinambungan kesejahteraan, yaitu struktur yang tidak terlalu tergantung pada sektor pertambangan. Sementara itu, lapangan usaha pertanian di Siak termasuk maju dibandingkan rata-rata Propinsi Riau. Namun kemajuannya tertekan, karena pertumbuhan dibawah rata-rata Propinsi Riau. Peningkatan produktivitas pertanian merupakan salah satu hal yang dapat meningkatkan pertumbuhan pertanian di Kabupaten Siak, sehingga setidaknya setara atau lebih besar dan pada rata-rata pertumbuhan Propinsi Riau.

5. Adanya sumbangan PDRB yang dominan dan Sektor Primer, terutama lapangan usaha pertambangan. Namun persentase jumlah penduduk Kabupaten Siak yang terlibat di lapangan usaha pertambangan sangat sedikit. Hal ini antara lain disebabkan teknologi produksi pada lapangan usaha pertambangan hanyammembutuhkan sedikit tenaga kerja. PDRB yang besar dan jumlah tenaga kerja yang sedikit, mencerminkan kemakmuran

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagi tenaga kerja yang bekerja di lapangan usaha ini. Sementara itu di lapangan usaha pertanian, kontribusi PDRB yang lebih kecil dihasilkan oleh tenaga kerja yang lebih banyak. Hal ini menyebabkan ketimpangan kesejahteraan diantara masyarakat Siak. Dimasa depan, lapangan usaha pertambangan tidak akan bertambah, sehingga diperlukan dorongan ke arah sektor sekunder, terutama industri pengolahan yang berbasis agroindustri untuk penyerapan tenaga kerja, agar tercapai pemerataan kesejahteraan yang lebih baik.

6. Adanya peningkatan pada persentase jumlah penduduk yang bekerja di Sektor Tersier, walaupun kontribusi sektor ini terhadap PDRB masih relatif kecil. Kontribusi PDRB yang kecil dengan jumlah pekerja yang banyak, mengindikasikan bahwa nilai tambah yang dihasilkan masing-masing pekerja sangat kecil. Perlu ada upaya peningkatan kualitas dan produktivitas Sumber Daya Manusia di sektor ini agar nilai tambah yang dihasilkan masing-masing pekerja menjadi besar. Sehingga total kontribusi nilai tambahnya terhadap PDRB menjadi besar.
7. Adanya kondisi sarana dan prasarana Kabupaten Siak yang saat ini cukup baik dalam segi kualitas, walaupun masih kurang dalam segi rasio kuantitas per penduduk, terutama rasio rumah sakit umum per penduduk. Di masa depan diprediksikan rasio jumlah sarana dan prasarana per penduduk di Kabupaten Siak akan semakin kecil akibat tidak sebandingnya pertumbuhan jumlah penduduk dengan pertumbuhan jumlah sarana dan prasarana.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Adanya kondisi Pemerintahan Kabupaten Siak yang saat ini semakin dituntut untuk meningkatkan kinerja dalam segi kualitas pelayanan, keandalan pelayanan, cepat tanggap dalam pelayanan, keyakinan pelayanan, bagi rasa dan perhatian dalam pelayanan. Diprediksikan dimasa depan tuntutan terhadap kinerja pemerintahan akan semakin tinggi.

#### 4.2.2 MISI KABUPATEN SIAK

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Siak Tahun 2005-2025, maka misi jangka panjang Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak sebagai pusat budaya Melayu di Riau adalah menjadikan Adat-istiadat Melayu sebagai nilai dasar dan alat pemersatu warga dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas serta menjunjung tinggi norma-norma hukum.
2. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak dengan sektor agrobisnis, agroindustri dan pariwisata yang maju adalah mendorong pembangunan sektor-sektor tersebut untuk yang menjamin pemerataan yang seluas-luasnya didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur yang maju, penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berwawasan lingkungan.
3. Misi Mewujudkan Kabupaten Siak yang agamis dan sejahtera adalah mendorong pembangunan yang mampu mewujudkan rasa aman dan damai, mampu menampung aspirasi masyarakat yang dinamis, yang menjamin penegakan hukum yang adil, konsekuen, tidak diskriminatif, mengabdikan pada



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepentingan masyarakat luas. Untuk melaksanakan Misi jangka panjang tersebut Pemerintah tertinggi Kabupaten Siak telah menetapkan Misi jangka menengah untuk lima tahun ke depan (2006 - 2011), yaitu:

- a. Mengembangkan dan meningkatkan sarana prasarana daerah yang mendukung peningkatan pemerataan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.
- b. Mengembangkan dan meningkatkan Sumber Daya Manusia professional yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan berjiwa kewirausahaan dengan di landasi keimanan, ketaqwaan, dan hal-hal Budaya Melayu.
- c. memberdayakan masyarakat, sumber daya alam dan seluruh kekuatan ekonomi daerah untuk memperkuat landasan struktur perekonomian berbasis kerakyatan yang bertumpu pada agribisnis, agroindustri dan pariwisata.

### 4.3 Sejarah Singkat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan peraturan Bupati Siak Nomor 87 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, dan tugas fungsi serta tata cara kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia daerah Kabupaten Siak. Sesuai dengan BAB II pasal 2 ayat (1) mengatakan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia merupakan unsur panjang urusan pemerintahan daerah dibidang Kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bab II pasal 2 ayat (2) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. Adapun Tugas pokok BKPSDM Kabupaten Siak adalah melaksanakan urusan dan pelayanan di bidang Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

#### 4.3.1 Visi dan Misi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Siak

Visi merupakan suatu yang di dambakan untuk dimiliki atau diperoleh dimasa yang akan datang (*what do they want to have*) sedangkan misi adalah apa yang di dambakan untuk menjadi yang diinginkan dimasa depan (*that thay want to be*). Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan itu, suatu organisasi mutlak perlu merumuskan misi yang akan diemban karena misi itulah yang berperan sebagai pemandu tindakan efektif dimasa depan.

Misi adalah maksud dan kegiatan utama yang membuat organisasi memiliki jati diri yang khas dan sekaligus membedakannya dengan organisasi lain yang bergerak dalam bidang usaha yang sejenis (Sondang, 2005:43-44). Visi BKPSDM Kab Siak adalah menjadi penyelenggara manajemen kepegawaian yang profesional dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang prima. Sedangkan misi bkpsdm kabupaten siak adalah: terselenggaranya manajemen kepegawaian yang profesional.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.3.2 Uraian Tugas Dan Wewenang Bkpsdm Kabupaten Siak

Tugas dan wewenang sangatlah diperlukan dimana tugas dan wewenang tugas dibuat agar seseorang karyawan/i dapat bekerja sesuai dengan tugas fungsi dan rincian tugas masing-masing bagi karyawan bagi namanya yang telah digabungkan ke dalam struktur organisasi tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan kerjanya masing-masing kepada atasannya.

Adapun tugas dan wewenang tugas dari masing-masing anggota organisasi adalah sebagai berikut:

#### 1. Kepala Badan

Kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia mempunyai tugas melaksanakan urusan dan pelayanan dibidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia untuk membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kepala badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kebijakan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- c. Pemantauan dan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintah daerah dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi, melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang pengawasan dan pembinaan penyelenggaraan administrasi umum perkantoran, penyusunan program dan penyelenggaraan administrasi keuangan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi; Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), sekretaris mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rancangan kebijakan badan;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang dan UPTB;
- c. Penyusun program dan melaporkan pengelolaan sistem informasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan badan;
- d. Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan, dan pengendalian administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan, kerumahtanggaan, dan kelembagaan.
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan.
- f. Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
- g. Pengoordinasian penyusunan standar operasi prosedur (SOP) kegiatan badan;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Penyusunan profil badan;
- i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan badan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**Kepala sub bagian perencanaan dan umum mempunyai tugas:**

- a. menyusun rencana operasional program kerja sub bagian perencanaan dan umum;
- b. Melaksanakan kegiatan surat menyurat;
- c. Melaksanakan kearsipan dan ekspedisi;
- d. Mengelola perpustakaan, informasi dan dokumentasi;
- e. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategi (Renstra);
- f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);
- h. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA;
- i. Melaksanakan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan program dan kegiatan;
- j. Mengevaluasi hasil program kerja;
- k. Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**4 Kepala subbagian keuangan dan kepegawaian mempunyai tugas;**

Menyusun rencana operasional program kerja subbagian keuangan dan dan kepegawaian;

- a. Mengendalikan rencana tahunan;
- b. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;
- c. Mengumpulkan dan mengolah data laporan hasil kegiatan;
- d. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyajian data statistik serta informasi;
- e. Membuat daftar gaji dan melaksanakan penggajian;
- f. Menyiapkan proses administrasi terkait denga penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan pembukuan setiap transkip keuangan pada buku kas umum;
- h. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- i. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu pemegang kas;
- j. Mengajukan spp untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP gaji atas persetujuan pengguna anggaran (kepala organisasi perangkat daerah) yang ditetapkan sebagai pengguna anggaran dengan keputusan bupati;
- k. Memeriksa pembayaran gaji skpp pegawai yang mutasi;
- l. Mendistribusikan uang kerja kegiatan kepada pemegang kas kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan pengguna anggraan;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

m. Melaksanakan kegiatan meneliti, mengoreksi dan menandatangani surat pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;

- a) Membuat laporan hasil kegiatan dan mengkoordinir laporan realisasi fisik dan keuangan (RFK);
- b) Membimbing, mengendalikan dan mengevaluasi hasil kerja bawahan dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja; dan
- c) Mengelola rumah tangga, perlengkapan dan penataan barang milik negara;
- d) Mengelola administrasi aset daerah dilingkup tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- e) Mempersiapkan berkas usulan tanda jasa/bintang penghargaan LP2P/LHKPN/LHKASN
- f) Mengelola administrasi kepegawaian pembinaan jabatan fungsional dan evaluasi kinerja aparatur sipil negara, dan
- g) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Bidang Administrasi Kepegawaian

Kepala bidang administrasi kepegawaian mempunyai tugas pokok, yakni: melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang administrasi kepegawaian agar berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yang meliputi pelaksanaan urusan dan pelayanan administrasi kepangkatan, mutasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jabatan, pengadaan, data dan informasi kepegawaian serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;

dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepala bidang administrasi kepegawaian mempunyai tugas:

1. Perumusan rencana pelaksanaan urusan dan pelayanan administrasi kepegawaian, mutasi jabatan, pengadaan, data dan informasi kepegawaian;
2. Pengawasan pelaksanaan tugas di bidang administrasi kepegawaian;
3. Pembinaan dan pengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas dan fungsi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
4. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang;
5. Penyiapan bahan pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **Kepala sub bidang kepegawaian mempunyai tugas:**

Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang kepegawaian;

- a. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara;
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- c. Mengumpulkan bahan laporan pelaksanaan program kerja/kegiatan;
- d. Memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Kepala sub bidang mutasi dan jabatan mempunyai tugas:**

Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang mutasi dan jabatan;

- a. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi mutasi pegawai;
- b. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi jabatan pegawai.
- c. Melaksanakan koordinasi penlaksanaan tugas dan fungsi ;
- d. Mengumpulkan bahan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
- e. Memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas dan fungsi, dan
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan, baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**Kepala sub bidang informasi dan pengadaan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang informasi dan pengadaan;
- b. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi data dan informasi kepegawaian;
- c. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan dokumentasi data arsip kepegawaian;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kebutuhan, formasi dan pengadaan pegawai;
- e. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kartu identitas pegawai dan kelengkapannya;
- f. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- g. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
- h. Memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- i. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangannya, tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### 8. Bidang pengembangan sumber daya aparatur

Kepala bidang pengembangan sumber daya aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan sumber daya aparatur agar berjalan sesuai dengan aturan dan prosedur yang telah ditetapkan meliputi pelaksanaan urusan dan pelayanan pengembangan karir pegawai serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2),

kepala bidang pengembangan sumber daya aparatur mempunyai tugas meliputi:

- a. Perumusan rencana pelaksanaan urusan dan pelayanan pengembangan karir, pendidikan dan pelatihan struktural, pendidikan dan pelatihan fungsional dan teknis secara pendidikan formal pegawai;
- b. Pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pengembangan sumber aparatur;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas dan fungsi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- d. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang'
- e. Penyiapan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

**9 Kepala sub bidang pengembangan karir mempunyai tugas:**

- Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang pengembangan karir;
- a. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi pengembangan karir pegawai;
  - b. Melaksanakan kegiatan uji kompetensi dan potensi pegawai, perencanaan pengembangan karir pegawai;
  - c. Melaksanakan kegiatan assesment pegawai;
  - d. Melaksanakan kegiatan atau memfasilitasi pegawai, mengikuti diklat teknis, bimbingan teknis, lokakarya, training, pertemuan dan rapat koordinasi pegawai;
  - e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
  - f. Menyiapkan bahan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program/kegiatan; dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **10. Kepala sub bidang pendidikan dan pelatihan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan kegiatan sub bidang pendidikan dan pelatihan;
- b. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi pendidikan dan pelatihan aparatur sipil negara;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan prajabatan, struktural dan fungsional aparatur sipil negara;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan; dan
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### **11. Kepala sub bidang pengembangan pendidikan formal mempunyai :**

- a. Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang pengembangan pendidikan formal;
- b. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi pendidikan formal pegawai;
- c. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi pendidikan ikatan dinas pegawai;
- d. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
- f. Memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- g. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### 12. Bidang pembinaan dan pengawasan aparatur

Kepala bidang pembinaan dan pengawasan aparatur mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan pengawasan aparatur agar berjalan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yang meliputi penyelenggaraan urusan dan pelayanan administrasi pembinaan pegawai, kesejahteraan pegawai dan kinerja pegawai serta koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi. Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala bidang pengembangan dan pengawasan aparatur mempunyai fungsi meliputi:

- a. Perumusan rencana pelaksanaan urusan dan pelayanan administrasi pembinaan, kesejahteraan dan kinerja pegawai;
- b. Pengawasan pelaksanaan tugas dibidang pembinaan dan pengawasan aparatur;
- c. Pembinaan dan pengarahan pelaksanaan tugas bawahan sesuai tugas dan fungsi dalam upaya meningkatkan produktivitas kerja;
- d. Penyiapan bahan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada pimpinan;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi bidang; dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

#### 13. Kepala sub bidang pembinaan mempunyai tugas:

- a. Menyusun peraturan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang pembinaan;
- b. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi pembinaan pegawai, disiplin dan penyelesaian kasus pegawai;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Penyiapan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
- e. Memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- f. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### 14. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan mempunyai tugas:

- a. Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang kesejahteraan;
- b. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kesejahteraan pegawai;
- c. Menyelenggarakan urusan kenaikan gaji berkala pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan pensiun pegawai;
- e. Menyelenggarakan peningkatan kesegaran jasmani pegawai;

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi pemberian penghargaan pegawai;
- g. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- h. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
- i. Memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- j. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

**15. Kepala Sub Bidang Kinerja mempunyai tugas:**

- a. Menyusun perencanaan teknis pelaksanaan program/kegiatan sub bidang kinerja;
- b. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan administrasi kinerja pegawai;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan kegiatan sasaran kinerja pegawai;
- d. Menyelenggarakan urusan dan pelayanan absensi dan cut pegawai;
- e. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan fungsi;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan program/kegiatan;
- g. Memberi tugas dan arahan kepada bawahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan tugas dan fungsi; dan
- h. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya dalam rangka mendukung kelncaran pelaksanaan tugas.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 4.4 Tujuan dan Sasaran

Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak adalah Terwujudnya Manajemen Kepegawaian yang handal dengan indikator capaian tujuan sebagai berikut:

#### Indeks kepuasan layanan kepegawaian

Indikator ini diharapkan dapat tercapai dengan target minimal pertahun diatas 65%, guna mendukung tercapainya tujuan, maka ditetapkan sasaran yang akan diraih adalah sebagai berikut: “meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian” dengan indikator persentase layanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu sesuai prosedur.

#### 2. Indeks profesional pegawai aparatur sipil negara

Indikator ini diharapkan dapat tercapai dengan target minimal pertahun diatas 65%, guna mendukung tercapainya tujuan, maka ditetapkan sasaran yang akan diraih antara lain sebagai berikut:

- a. Meningkatnya kompetensi pegawai aparatur sipil negara, Indikator : persentase pegawai aparatur sipil negara yang telah lulus mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai jabatan.
- b. Meningkatnya kinerja pegawai aparatur sipil negara
- c. Meningkatnya disiplin pegawai aparatur sipil negara, Indikator persentase tingkat kedisiplinan pegawai aparatur sipil negara.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Strategi dan kebijakan

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah adalah sebagai berikut:

Memanfaatkan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan administrasi kepegawaian sehingga dapat menyajikan sistem informasi kepegawaian yang efektif dan efisien.

Melaksanakan manajemen ASN berdasarkan berdasarkan sistem merit berdasarkan penilaian kompetensi dan kualifikasi pendidikan dan pelatihan yang diperlukan dalam rekrutmen, pengangkatan, penempatan dan promosi pada jabatan.

3. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan kompetensi keterampilan dan kemampuan pegawai ASN
4. Meningkatkan pengawasan dan memberikan pembinaan pegawai serta evaluasi kinerja pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi guna meningkatkan integritas dan loyalitas pegawai.

Kebijakan yang diambil adalah:

- a. Mengembangkan sistem informasi pelayanan kepegawaian yang efektif dan efisien sehingga dapat memberikan informasi yang handal dan terpercaya
- b. Melaksanakan manajemen ASN berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI

### PENUTUP

#### Kesimpulan

Berdasarkan penyajian serta analisis yang telah disajikan sebelumnya, maka peneliti dapat memberikan beberapa kesimpulan dari hasil penelitian ini, hasil penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dalam Kerjasama Luar Negeri di bidang Pendidikan dipandang positif dan dinilai sangat baik dan berani, karena merupakan suatu langkah baru dan inovatif dalam memajukan daerah nya, terlebih lagi dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dalam menghadapi persaingan globalisasi ini nanti kedepannya.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak sadar akan kekuatan dan potensi yang dimiliki daerahnya, selama ini banyak daerah yang belum sadar bahwa sebenarnya posisi dia dalam tatanan pemerintahan itu kuat, dan sudah bisa berdiri sendiri, namun banyak diantara mereka yang belum sadar akan hal itu, dan hanya bisa bermain aman dalam menjalankan roda pemerintahannya saja, padahal kekuatan hukum dan legalitas mereka sudah sangat diakui terlebih lagi dalam proses pengambilan kebijakan dan meningkatkan kualitas pelayanan publiknya tanpa mengharapkan dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) maupun APBD (Anggaran Pendapatan Belanja



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Daerah), tetapi lebih memilih inisiatif dengan melibatkan pihak swasta untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyukseskan program peningkatan mutu kualitas Sumberdaya manusia Kabupaten Siak melalui dana *CSR (Corporate Social Responsibility)*.

#### Saran

Adapun saran-saran yang penulis dapat sampaikan dari hasil penelitian ini hasil penelitian yang dilakukan untuk melihat bagaimana Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak di Bidang Pendidikan (Study kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University), maka dapat penulis sampaikan bahwa:

1. Sebaiknya pemerintah kabupaten Siak dalam hal ini bidang BKPSDM melakukan perekrutan peserta secara terus-menerus, ini bertujuan untuk memudahkan menumbuhkan semangat persaingan masyarakat Siak, dan mempersiapkan orang-orang yang memiliki semangat dan tekad yang kuat untuk dapat bersaing dengan negara luar.
2. Pemberian pemahaman tentang pentingnya pembuatan proposal riset yang baik dan benar juga merupakan kunci utama yang harus mampu dikuasai oleh masyarakat Kabupaten Siak, mengingat pengalaman gagal nya peserta yang tidak lulus seleksi disebabkan oleh buruknya hasil proposal riset study mereka yang menyebabkan mereka tidak diterima oleh pihak Chiba University
3. Pemerintah harus membuat rincian di surat MoU tentang perbedaan standar kualitas sumber daya manusia yang dimiliki antara Siak dan Jepang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pemerintah harus mulai mempersiapkan anggaran khusus baik itu dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) ataupun APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) maupun dana CSR (Corporate Social Responsibility) yang lebih baik dan jelas lagi.
5. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Siak Perlu membuat aturan yang jelas tentang kejelasan status peserta yang sudah menempuh pendidikan di Jepang baik dengan pihak Pemerintah Kabupaten Siak maupun Chiba University, apabila telah menyelesaikan studinya kelak di Jepang, sehingga itu semakin menjadi motivasi bagi banyak orang maupun pribadi individu yang telah berjuang dan bekerja keras selama proses mengikuti program ini.
6. Karena Minimnya informasi, sebaiknya pemerintah Kabupaten Siak melakukan proses karantina dan pembimbingan lebih mendalam kepada peserta yang sudah diterima di Chiba University, ini berguna apabila ada hal-hal yang tidak dimengerti oleh peserta yang akan melanjutkan tahap seleksi wawancara di Chiba University dapat melakukan persiapan terlebih dahulu karena ada pembekalan yang diberikan lama menjalani proses karantina.
7. Perlu adanya perubahan pada naskah MoU (*Memorandum of Understanding*) yang menjelaskan dengan rinci berapa kali proses perekrutan dan penerimaan peserta dilakukan, sehingga semakin banyak peserta yang dapat mengikuti program ini, apalagi untuk masyarakat Siak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sedang tidak berada di Siak. Dan perlu diadakannya bantuan beasiswa lain bagi peserta yang tidak lulus untuk berangkat ke Jepang.

8. Koordinasi antara pemimpin sebelumnya dengan pemimpin yang saat ini menjabat perlu lebih intens dilakukan, mengingat kebijakan ini merupakan sebuah langkah besar yang menyangkut tentang peningkatan mutu sumber daya manusia Siak, sehingga perlu dilakukan secara berkesinambungan
9. Pemerintah Kabupaten Siak harus melakukan evaluasi terkait persiapan dan seluruh rangkaian program yang berkaitan dengan kebijakan ini, sehingga dapat ditemukan solusi yang memang sesuai berdasarkan kajian yang mendalam dan profesional.
10. Sebaiknya pemerintah Kabupaten Siak bisa melakukan sosialisasi atau membuat FGD (Focus Group Discussion) yang diikuti oleh Pejabat-pejabat daerah atau elemen masyarakat untuk mensyiarkan dalam memaksimalkan potensi daerahnya dan menggunakan dana CSR dalam membantu menyukseskan program pemerintah.





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Surah Ar-Rum: 22

Al-Qur'an Surah Ar-Rad:11

Hadits Shahih Bukhari Muslim:4789

Agustino, Leo, 2014, "*Dasar-Dasar Kebijakan Publik*", Alfabeta. Bandung:

Departemen Luar Negeri, Panduan Umum Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Jakarta: Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya, 2003.

Dunn, William N, 2003. "*Analisis Kebijakan Publik*". Gadjah Mada University Press. Yogyakarta:

Hamdi, Muchlis, 2015, "*Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*", Ghalia Indonesia. Bogor:

Muhammad, Ali, 2005,"*Manajemen Penelitian*", PT. Rineka Cipta. Jakarta:

Murniasih, Erni, 2009, "*Buku Pintar Beasiswa*", Gagas Media. Jakarta:

Nugroho, Riant. 2011, "*Public Policy*", PT. Elex Media Komputindo Kelompok Media. Jakarta:

Pasolong, Harbani,2013, "*Teori Kebijakan Publik*", Alfabeta.Bandung:

Purwanto, Erwan Agus, dan Sulistyastuti, Dyah Ratih, 2012, "*Implementasi Kebijakan Publik; Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*", Gava Media. Yogyakarta:

Suharno, 2008,"*Prinsip-Prinsip Dasar Kebijakan publik*", UNY Press. Yogyakarta:

Subarsono, 2011,"*Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*", Pustaka Pelajar. Yogyakarta:

Sugiyono, 2012, "*Memahami Penelitian Kualitatif*", Alfabeta. Bandung:

Sunarno, Siswanto, 2009,"*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*", Sinar Grafika. Jakarta:

Usman, Husaini, 2009, "*Metode Penelitian Sosial*", Bumi Aksara. Jakarta:



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahab, Solichin Abdul, 2014, *“Analisis Kebijakan Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan publik”*, Bumi Aksara. Jakarta:

\_\_\_\_\_, 1997, *“Analisis Kebijaksanaan, Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara”*, Bumi Aksara. Jakarta:

Rudi, T. May, 2005, *“Administrasi & Organisasi Internasional”*, Refika Aditama. Bandung:

\_\_\_\_\_, 2018, *“Pengantar Ilmu Politik; Wawasan Pemikiran dan Kegunaannya”*, Refika Aditama. Bandung:

Siagian, P Sondang, 2005, *“Fungsi-Fungsi Manajemen”*, Bumi Aksara. Jakarta:

Sugiono, 2003, *“Metode Penelitian”*, Alfabeta. Bandung:

\_\_\_\_\_, 2005, *“Metode Penelitian Administrasi”*, Alfabeta, Bandung:

Widodo, Joko. 2001. *“Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah”*. Insan Cendekia, Surabaya:

Winarno, Budi, 2002, *“Apakah Kebijakan Publik? Dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik”*, Media Preszsindo. Yogyakarta:

\_\_\_\_\_, 2007, *“Kebijakan Publik Teori dan Proses”*, Media Pressindo, Yogyakarta:

## Jurnal/ Arikel

Damos Dumoli Agusman, *“ Apa perjanjian internasional itu? Beberapa Perkembangan Teori dan Praktek di Indonesia tentang Hukum Perjanjian Internasional.” Perjanjian Internasional dalam Teori dan Praktek di Indonesia: Kompilasi Permasalahan*, Direktorat Perjanjian Ekonomi Sosial dan Budaya Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Luar Negeri Departemen Luar Negeri RI, 2008

Eddy Damian. *“Beberapa Pokok Materi Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional,” Jurnal Hukum Internasional.”* Vol. 2 No. 3 Desember 2003.

Eman suapрман *Perjanjian Internsional sebagai Model Hukum Bagi Pengaturan Masyarakat Global (Menuju Konvensi ASEAN sebagai Upaya Harmonisasi Hukum)*, Bandung, 2000.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Frank, Flo and Anne Smith, 2000, *The Partnership Handbook, Ministry of Public and Government Service, Canada* dalam Penyelenggaraan Kerjasama Antar Daerah, LAN, Jakarta, 2004

Jawahir Thontowi. *Jurnal Hukum No.2 Vol. 16 Tahun 2009: 149-168*. Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 Tanggal:28 Desember 2006 Tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah, Deplu, Jakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Masrohatun. *Jurnal SAWALA Vol.6 No.1 April 2018, 49-62 p-ISSN 2302-2231 e-ISSN 2598-4039*.

Muh Askal Basir, *Jurnal Ilmu Pemerintahan: Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah. Vol. 1 No. 1 10 Juni 2016, jilid 1, hal 86-106. ISSN 2528-0724 (Online) ISSN 2503-4685 (print)*

Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah Revisi Tahun 2006, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia 2012.

Irdyanti. ‘*Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan.*’ Vol. 17 No.1 Janari-Juni 2014. Khutubkanah. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Robert P. Silalahi. *Affiliation between Cities (Sister Cities) the Jakarta Experience*. Makalah pada Konferensi *Local Way of International Cooperation*, Klafir, Seoul Korea, 1995

Sayid Fadil, 2007. Kerjasama Luar Negeri oleh Daerah dalam rangka Kerjasama *Sister City* dan Kerjasama Sub-Regional Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle. Makalah disampaikan pada Lokakarya ‘*Aktualisasi Tata Cara Hubungan Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah*’. Kerjasama Departemen Luar Negeri dengan Fakultas Hukum USU, Medan.

Syaukani, dkk. *Otonomi Daerah, Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Kerjasama Pustaka Pelajar dengan Pusat Pengkajian Etika Politik dan Pemerintahan. 2002.

Zulkifli. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos Vol.3 No.2 Juli 2014*

**Peraturan perundang-Undang :**

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional

Lampiran Pertauran Menteri Luar Negeri Nomor: 09/A/KP/XII/2006/01 tentang Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri oleh Pemerintah Daerah. Bagian Tujuan Pembentukan Pelaksanaan

Surat Edaran Bupati Siak Nomor: 893.2/BKPSDM/2017/449 Perihal Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Chiba University

Lembar Pengumuman Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Chiba Jepang Nomor: 422.1/ Pengumuman/BKPSDM/2017/490

Lembar penunjukan NomorL 893.2/BKPSDM/2017/475 kepada sdr Husnul Kausarian, Ph,D selaku penghubung antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Universitas Chiba Jepang sekaligus sebagai ketua Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Chiba Jepang Tahun 2018.

Surat Permohonan Persetujuan Rencana Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten Siak Dan Universitas Chiba Jepang Nomor: /Bappeda-V/050.13/IX/2016 pada September 2016, ditujukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

Surat tugas Rektor No.1733/A-UIR/5-2017 sebagai panitia kegiatan Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Siak dan Chiba University, Jepang.

Lembar Hasil Resume Rapat dalam Pembahasan Rencana Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Siak dan Universitas Chiba-Jepang, Kamis 27 oktober 2016, pada pukul 10.00 WIB-Selesai di RR.II Pusat Fasilitas Kerja Sama, Gd B lt. 9, Kementerian Dalam Negeri Jl. Merdeka Utara No.7, Jakarta Pusat.

Letter Of Intent (LoI) Beetween The Government Of Siak Regency, Riau Province Of The Republic Of Indonesia And Chiba University, Japan On Human Resources Development

Agreement For Academic Exchange And Cooperation Between Center For Enviromental Remote Sensing (Ceres) Chiba University, Japan And Goverment Of Siak Regency, Riau Province Indonesia, Pada Tanggal 21 November 2016.

Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) antara Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia, penelitian, Konsultasi dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Nomor: /HK/MoU/2016



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Acuan Kerja Kunjungan Kerja Luar Negeri dalam Rangka Menghadiri Undangan *The Indonesian-Japan Joint Scientific Symposium (IJSS)* 2016, Narasumber Orasi Ilmiah Internasional Tentang Lingkungan Hidup Dan Penandatanganan Pernyataan Kehendak Antara Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Republik Indonesia Dengan Universitas Chiba Jepang tanggal 20-24 November 2016

Lembar Daftar Peserta yang Mengikuti Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Chiba Jepang Tahun 2018 Program Magister (S2) dan Doktoral (S3)

Lembar Daftar Hadir Peserta yang Mengikuti Tes Wawancara Penerimaan Mahasiswa Baru Universitas Chiba Jepang Tahun Ajaran 2018, ditandatangani di Pekanbaru pada tanggal 16 Desember 2017.

Laporan Proses Seleksi Calon Mahasiswa Kabupaten Siak yang Akan Melanjutkan Study Magister (S2) dan Doktoral (S3) di Chiba University, ditandatangani di Pekanbaru, 18 Desember 2017.

**Skripsi :**

Alfero Widyatama, 2018, *Motivasi Vietnam Menjalin Kerjasama Dengan Indonesia Dalam Bidang Pertahanan Tahun 2010-2017*. Skripsi. Jurusan Hubungan internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, pekanbaru.

Elma Putri Walidi, 2018. *Implementasi Kebijakan Subsidi Listrik Tepat Sasaran Rumah Tangga Tidak Mampu (Study Kelurahan Air Jamban Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis*. Skripsi. Jurusan Administrasi Negara, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. Pekanbaru

Fenny Desty, 2018. *Kerjasama Perdagangan Antara Indonesia Dengan Spanyol Dalam Bidang Kelautan Sektor Perikanan Pada Kerangka Kerja PCA (Partnership Cooperation Agreement) Tahun 2014-201*. Skripsi. Jurusan Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Internet:**

- <https://bappeda.siakkab.go.id/kerjasamaPemerintahKabupatenSiakDenganUniversitasChibaJepang> oleh Hendrizal diakses pada Minggu, 10 November 2019, pada pukul 08.19Wib.
- <https://scholar.google.co.id> All Reserved of International Jurnal of Advances in Intelligent Informatics 4 (2), 132-141, 2018 diakses pada hari Senin, 11 Novemver 2019, pada pukul 00.53 Wib.
- <http://Porosriau.com/SIAK/KunjungiUniversitasChiba>, ini yang dilakukan Pejabat Siak Selama di Jepang oleh Atok, diakses pada Senin, 11 November 2019, pada pukul 00.58 wib.
- <https://pekanbaru-tribunnews-combangunkerkasamdengachibauniversity,4pejabatsiakberangkatkejepang> oleh Mayonal Putra diakses apda Senin, 11 November 2019 pada pukul 01.03 wib
- <http://infoPublik.id/read/194750/kerjasamaPemerintahKabupatenSiakdanChibaUniversityJepang,olehTobari> diakses pada Senin, 11 November 2019, pada pukul 01.05 wib.
- <http://bappeda.siakkab.go.id/kerjasamapembangunandaerah> oleh Hendrizal Pengumuman Penerimaan Mahasiswa Baru Di Universitas Chiba Jepang, diakses pada Senin, 11 November 2019, pada pukul 01.08 wib.
- <http://www.chiba-u.ac.jp/e/> copy right 2010-2019 Chiba University diakses pada hari Seni, 11 November 2019, apda pukul 01.10 Wib.
- <https://simdos.unud.ac.id> diakses pada Selasa, 12 November 2019, pada pukul 01.05 Wib.
- <https://www.riauonline.co.idInginS2DanS3KeJepang?PemkabSiakBukaPendaftaranBeasiswaKeUniversitasChiba> oleh Hasbullah Tanjung diakses pada Selasa, 12 November 2019, pada pukul 01.07 Wib.
- <https://riauonline.co.idSiakSatuSatunyaPemdaDiRiauJalinKerjasamaDenganUniversitasChibaDiJepang> oleh Avin diakses pada Selasa, 12 November 2019, pada pukul 01.10 Wib.
- <https://www.studineews.co.idPengertianBeasiswa,Tujuan,Syarat,Manfaat,JenisdanContohnya> oleh StudNews diakses pada Selasa, 26 November 2019, pada pukul 23.15 Wib.

UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

## DOKUMENTASI



**Gambar 1**

**Foto bersama Kepala Dinas Bidang Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Siak (tengah) H. M. Agung Apandi, S.STP, M.Si dan (kiri) selaku Kepala Sub Bidang (Kasubid) Kerjasama Daerah Kabupaten Siak bapak Muhammad Faisal Harahap, ST**



**Gambar 2**

**Foto Bersama Di Gedung Bappeda Kabupaten Siak**

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

www.chiba-u.ac.jp/e/

and Technology of Institut Teknologi Bandung	Graduate School of Advanced Integration Science	
Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Faculty of Agriculture, Faculty of Agricultural-Industrial Technology, Faculty of Geology and Graduate School of Environmental Study, Padjadjaran University	Graduate School of Horticulture Center for Environment, Health and Field Sciences Center for Environmental Remote Sensing Graduate School of Advanced Integration Science	2012.11.7
Research Center for Chemistry, Indonesian Institute of Sciences	Graduate School of Engineering	2013.5.27
Udayana University	Center for Environmental Remote Sensing	2013.12.20
Muhammadiyah Gorontalo University	Center for Environmental Remote Sensing	2014.2.27
Postgraduate Program Universitas Negeri Makassar	Graduate School of Horticulture	2014.6.26
Faculty of Mathematic and Natural Science, Universitas Mulawarman	Center for Environmental Remote Sensing	2015.6.8
Faculty of Mathematic and Natural Science, Universitas Negeri Padang	Center for Environmental Remote Sensing	2015.9.7
Center for Environmental Studies, Budi Luhur University	Center for Environmental Remote Sensing	2015.12.2
Education Department of West Java province	Faculty of Education	2016.8.9
Regency of Siak	Center for Environmental Remote Sensing	2016.11.21
College of Agriculture and Life Sciences, Chonnam	Faculty of Horticulture	2004.6.25

Gambar 3

Nama Kabupaten Siak Masuk Dalam Situs Chiba University, Bukti Bahwa Mereka Telah Menjalinkan Kerjasama



Gambar 4

Penandatanganan Mou (*Memorandum of Understanding*) antara Kabupaten Siak dan Chiba University pada momen Simposium Internasional Bilateral antara Jepang-Indonesia (Indonesian- Japan Joint Scientific Symposium (IJSS) 2016, pada tanggal 23 September 2016 di Gedung Konvensi Chiba University





# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmpptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/17052  
TENTANG



182010

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Pra Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/61/2019 Tanggal 3 Januari 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **TENGKU YULMIDA**
2. NIM / KTP : **11575201535**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **ANALISIS KERJASAMA LUAR NEGERI SISTER CITY KABUPATEN SIAK-TRENGGANU**
7. Lokasi Penelitian : **BUPATI SIAK**

Dengan Ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan ini.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.

Demikian Rekomendasi ini diberikan agar dapat digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini dan terima kasih.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 7 Januari 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI RIAU

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. P. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
4. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
5. Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



# PEMERINTAH KABUPATEN SIAK

## KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Panglima Ghimban/ Rumah Dinas Jabatan Blok. II  
SIAK SRI INDRAPURA

Nomor : 070/Kesbangpol/08  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Riset

Kepada:  
Yth. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Siak

di-  
Tempat

Memenuhi maksud surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor: 503/DPMFTSP/NON IZIN-RISSET/17052 tanggal 7 Januari 2019 tentang perihal tersebut diatas, maka kami memberikan Rekomendasi Riset/Pra Riset kepada Saudara/i:

Nama : TENGKU YULMIDA  
Nomor Mahasiswa : 11575201535  
Program Studi : Administrasi Negara  
Jenjang : S1  
Alamat : PEKANBARU  
Judul Penelitian : "ANALISIS KERJASAMA LUAR NEGERI SISTER CITY KABUPATEN SIAK-TRENGGANU".

Dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan Riset/Pra Riset dan pengumpulan data ini ;
- b. Pelaksanaan Kegiatan Riset/ Pra Riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat;
- c. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar hasil Riset/ Pra Riset yang telah dilaksanakan kepada Kantor Kesbang dan Politik Kabupaten Siak dan Instansi yang bersangkutan.

Demikian Rekomendasi ini di berikan, agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini, dan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal : 8 Januari 2018

a.n. KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK KABUPATEN SIAK  
Kasubbag Tata usaha



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
2. Yang bersangkutan

KEMENTERIAN AGAMA  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية  
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES  
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box 1004 Telp. 0761-562051  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : Un.04/F.VII/PP.00.9/4600/2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 23 Juli 2019 M  
20 Zulqaidah 1440 H

Kepada  
Yth. Kepala Kantor  
Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Provinsi Riau  
di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

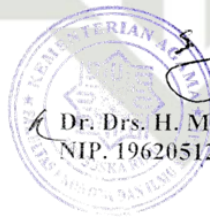
Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas  
Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Tengku Yulmida  
NIM. : 11575201535  
Jurusan : Administrasi Negara  
Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:  
"Peran Pemerintah Kabupaten Siak dalam Kerjasama Luar Negeri di  
Bidang Pendidikan " Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan  
memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. Drs. H. Muh. Said HM, M.Ag, MM  
NIP. 19620512 198903 1 003

UIN SUSKA RIAU





milik UIN Suska Riau

State Islamic University

Syarif Kasim Riau

# PEMERINTAH PROVINSI RIAU

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau  
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU  
Email : dpmptsp@riau.go.id Kode Pos : 28126



032010

### REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/25870  
TENTANG

### PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau, Nomor : Un-04/F.VII/PP.00.9/4600/2019 Tanggal 23 Juli 2019**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

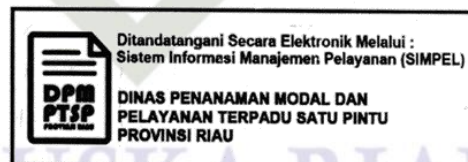
1. Nama : **TENGKU YULMIDA**
2. NIM / KTP : **11575201535**
3. Program Studi : **ADMINISTRASI NEGARA**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DI BIDANG PENDIDIKAN ( STUDY KASUS BEASISWA CHIBA UNIVERSITY)**
7. Lokasi Penelitian : **DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIAK**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 10 September 2019



#### Tembusan :

#### Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Siak
3. Kab. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Siak Sri Indrapura
3. Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau di Pekanbaru
- ④ Yang Bersangkutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : JON KENEDI  
NIP : 19851119 200604 1 001  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)  
Jabatan : Kasubbid Diklat  
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Siak.

Dengan ini menyatakan bahwa berdasarkan surat Kantor Kesbangpol Kabupaten Siak Nomor 070/Kesbangpol/318 tanggal 19 September 2019 perihal Rekomendasi Riset, Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau an. T. YULMIDA, NIM 11575201535, benar telah melakukan penelitian tentang **ANALISIS KEBIJAKAN LUAR NEGERI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIAK DI BIDANG PENDIDIKAN (STUDI KASUS BEASISWA CHIBA UNIVERSITY)** bertempat di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak Jl. Hang Tuah Nomor 13, Siak Sri Indrapura.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Siak Sri Indrapura, 19 September 2019  
Yang menyatakan,



JON KENEDI  
NIP. 19851119 200604 1 001

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

AGREEMENT FOR ACADEMIC EXCHANGE AND COOPERATION  
 BETWEEN  
 CENTER FOR ENVIRONMENTAL REMOTE SENSING (CEReS)  
 CHIBA UNIVERSITY, JAPAN  
 AND  
 GOVERNMENT OF SIAK REGENCY, RIAU PROVINCE  
 INDONESIA

Center for Environmental Remote Sensing (CEReS), Chiba University, Japan and Government Of Siak Regency, Riau Province, Indonesia, with the objective of facilitating mutual friendship, academic research and educational cooperation between the two institutions, hereby conclude this agreement.

Article 1. Center for Environmental Remote Sensing (CEReS), Chiba University and Government Of Siak Regency, Riau Province, Indonesia will cooperate in promoting both academic research and enhancing educational opportunities for students.

Article 2. In order to promote the cooperation prescribed in Article 1, the two institutions may undertake various activities such as those listed below. The details of the collaboration will be specified through separate negotiations.

- (1) Exchange of faculty members and researchers
- (2) Exchange of students
- (3) Organization of joint research projects, including conferences and meetings
- (4) Exchange of information and publications
- (5) Other activities mutually agreed upon by the two institutions

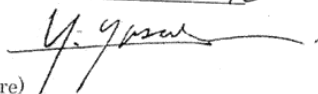
Article 3. This agreement shall become effective on the date of signature by the representatives of the two institutions, and will be effective for a period of five (5) years and shall be automatically renewed for another five (5) years unless either party undertakes in writing to withdraw from the agreement. A written declaration of withdrawal must be made no later than six (6) months before the termination of a given five (5) year program.

Article 4. Amendments to this agreement may be made by mutual written consent of the two institutions.

Article 5. This agreement may be terminated upon six (6) months' written notice by either side.

Article 6. This agreement shall not bind either institution to any financial commitment.

Date: 21 November, 2016



(Signature)  
Yoshifumi Yasuoka  
Director  
Center for Environmental Remote Sensing  
Chiba University

Date: 21 November 2016



(Signature)  
Drs. H. Syamsuar, M.Si  
Regent  
Government of Siak Regency  
Riau Province, Indonesia



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siak Sri Indrapura, September 2016

Kepada  
Yth. Bapak Menteri Dalam Negeri  
Republik Indonesia  
di –

JAKARTA

Nomor : /Bappeda-V/050.13/IX/2016  
Sifat : Sangat Penting  
Jumlah : 3 (Tiga) Berkas  
Perihal : Permohonan Persetujuan Rencana  
Kerjasama Antara Pemerintah Kabupaten  
Siak dan Universitas Chiba Jepang

Dengan hormat,

Menindaklanjuti undangan Prof. Hiroaki Kuze, General Chairman IJSS 2016, Vice Director, Center For Environmental Remote Sensing Chiba University tertanggal 23 September 2016 (terlampir) tentang penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Siak dan Universitas Chiba yang akan diselenggarakan di Keyaki Kaikan (Gedung Konvensi) Universitas Chiba, Jepang pada tanggal 20-24 Nopember 2016, dapat kami sampaikan kepada Bapak Menteri bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Siak tahun 2016-2021 yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Siak Yang Maju dan Sejahtera Dalam Lingkungan Masyarakat Yang Agamis dan Berbudaya Melayu Serta Menjadikan Kabupaten Siak Sebagai Tujuan Pariwisata di Sumatera”**, telah ditetapkan misi yang selaras dengan prioritas Nawa Cita Pemerintah dan agenda pembangunan dunia *Sustainable Development Goals (SDGs)*, diantaranya meningkatkan kualitas hidup manusia; mewujudkan kedaulatan pangan; menjamin ketersediaan akses air bersih; serta mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan.

Dalam menjalankan misi tersebut di atas, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Siak, antara lain:

- Masih rendahnya tingkat pendidikan penduduk di Kabupaten Siak. Dari total jumlah penduduk Kabupaten Siak sebanyak 408.034 jiwa, hanya 9.108 jiwa atau 2,23 persen yang berpendidikan S-1/S-2/S-3, sehingga sangat sulit untuk dapat bersaing dalam menghadapi pasar global khususnya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
- Belum terpenuhinya kebutuhan pangan lokal. Komoditas utama pertanian di Kabupaten Siak yaitu tanaman padi, dengan luas lahan sawah sebesar 6.100 Ha dan produksi padi mencapai 30.306 ton/tahun. Saat ini ketersediaan pangan hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan lokal sebesar 57,24 persen.
- Akses air bersih bagi masyarakat yang belum merata. Dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Siak, terdapat 12 kecamatan yang telah dibangun Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Saat ini cakupan air bersih baru mencapai 50,45 persen.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Sering terjadinya kebakaran lahan dan hutan yang mengakibatkan pencemaran udara. Sebagian besar lahan di wilayah Kabupaten Siak berstruktur tanah gambut yang rawan terhadap terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Dari 131 kampung/kelurahan di Kabupaten Siak telah ditetapkan sebanyak 67 Kampung/kelurahan di 9 kecamatan yang rawan kebakaran dengan luas lahan gambut sebesar 461.527 Ha atau 34,76% dari total luas lahan Kabupaten Siak Pada tahun 2016 dari Januari sampai Juli saja sudah tercatat 381 kali kejadian kebakaran lahan dan hutan, dengan luas lahan terbakar sebesar 962,12 Ha.
5. Tingginya pencemaran air Sungai Siak sebagai sumber air baku akibat pengelolaan limbah yang tidak tepat. Data dari Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera, potensi beban pencemar terbesar Sungai Siak di Kabupaten Siak bersumber dari limbah *Chemical Oxygen Demand (COD)* sebesar 151.440,96 Kg/hari. Saat ini telah terjadi kelebihan beban pencemaran *Chemical Oxygen Demand (COD)* Sungai Siak di Kabupaten Siak sebesar 3.245.469,59 kg per hari.

Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Siak telah melakukan diskusi awal dengan perwakilan Universitas Chiba dan telah merumuskan beberapa solusi yang tertuang dalam rencana butir-butir kerjasama (terlampir). Sebagai tindaklanjutnya, Pemerintah Kabupaten Siak akan menjalin kerjasama dengan Universitas Chiba di Jepang dalam hal pengembangan sumber daya manusia, penelitian, konsultasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Universitas Chiba merupakan salah satu universitas negeri terkemuka di Jepang. Saat ini universitas tersebut telah mengembangkan berbagai teknologi di bidang pertanian dan perkebunan, bidang energi dan sumber daya alam, bidang lingkungan hidup serta bidang pengelolaan air bersih dan pengolahan sampah.

Sehubungan dengan hal tersebut serta memenuhi undangan Universitas Chiba tertanggal 23 September 2016 (terlampir) tentang penandatanganan MoU antara Pemerintah Kabupaten Siak dan Universitas Chiba yang akan diselenggarakan di Keyaki Kaikan (Gedung Konvensi) Universitas Chiba, Jepang pada tanggal 20-24 Nopember 2016, dengan ini kami mohon izin melakukan kerjasama dengan Universitas Chiba, Jepang.

Demikian disampaikan, selanjutnya mohon kiranya persetujuan Bapak Menteri terhadap rencana kerjasama dimaksud. Atas perhatian dan dukungan dari Bapak Menteri, kami mengucapkan terima kasih.

BUPATI SIAK,

Drs. H. SYAMSUAR, M.Si

Terselamatkan disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri  
Kementerian Dalam Negeri di Jakarta
2. Gubernur Riau di Pekanbaru
3. Ketua DPRD Kabupaten Siak di Siak Sri Indrapura

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERJANJIAN PROGRAM KERJA SAMA PERUKARAN SUMBER DAYA MANUSIA  
ANTARA  
CHIBA UNIVERSITY, JEPANG  
DAN  
PEMERINTAH SIAK KABUPATEN, PROVINSI RIAU, INDONESIA

Sesuai dengan Pasal 2 (2) dalam Perjanjian Pertukaran Akademik dan Kerjasama antara Chiba University, Jepang, dan Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia Universitas Chiba dan pemerintah kabupaten Siak setuju untuk bertukar sumber daya manusia sebagai berikut:

Pasal 1. Perjanjian tersebut meliputi pertukaran mahasiswa sarjana dan pascasarjana / sumber daya manusia yang akan terjadi secara teratur.

Pasal 2. Kecuali jika didefinisikan, "pertukaran" berarti pertukaran seorang mahasiswa / SDM dari universitas Chiba dan pemerintah kabupaten Siak. "pertukaran pelajar" berarti siswa / sumber daya manusia yang berpartisipasi dalam pertukaran, "pengiriman dari universitas" berarti sumber daya manusia mahasiswa universitas dan "penerimaan oleh universitas" berarti universitas yang telah setuju untuk menerima siswa pertukaran / SDM dari utusan pemerintah kabupaten Siak.

Pasal 3. Calon yang terpilih untuk program pertukaran akan direkomendasikan oleh universitas/pemkab Siak untuk dikirim sebagai mahasiswa "pertukaran pelajar". Universitas/pemkab Siak sebagai penerima akan meninjau catatan akademis dan merekomendasikan untuk menentukan kelayakan mereka untuk program tertentu.

Pasal 4. Universitas / pemkab Siak setuju untuk hanya menerima siswa / sumber daya manusia yang tidak mencari gelar di universitas penerima.

Pasal 5. Biaya yang dikeluarkan oleh siswa pertukaran dalam program berdasarkan perjanjian ini, kecuali untuk biaya yang ditanggung oleh Pasal 6, akan ditanggung oleh siswa.

Pasal 6. Universitas penerima akan menanggung biaya aplikasi, pendaftaran dan biaya kuliah.

Pasal 7. Perjanjian tersebut memungkinkan hingga (dua (2)) siswa untuk belajar di universitas penerima untuk jangka waktu sampai dengan 12 bulan secara tahunan. Universitas-universitas dan pemerintah kabupaten Siak akan meninjau program setiap tahun untuk setiap jumlah dari pertukaran mahasiswa dan melakukan upaya untuk menjaga keseimbangan yang wajar dalam jumlah pertukaran pelajar. Kedua universitas akan berusaha untuk membuat jumlah siswa pertukaran yang sama pada akhir perjanjian.

Pasal 8. Calon siswa pertukaran harus memenuhi persyaratan kemampuan bahasa untuk studi mereka, dan harus telah menyelesaikan setidaknya satu (1) tahun studi berkelanjutan di universitas pengirim sebelum dimasukkan ke program pertukaran. Pertukaran pelajar Calon yang berlaku untuk studi di tingkat pascasarjana harus telah menyelesaikan setidaknya satu (1) semester studi pascasarjana sebelum



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimasukkan ke program pertukaran. Mahasiswa diharapkan untuk kembali ke universitas pengirim setelah selesainya program pertukaran.

Pasal 9. Universitas pengirim akan memberikan penilaian yang akan diberikan kepada universitas penerima sesuai dengan peraturan dari universitas pengirim.

Pasal 10. Universitas dan Pemerintah kabupaten Siak akan membantu siswa pertukaran yang tercantum dalam ketentuan perjanjian ini dalam mengamankan akomodasi dan dalam mencapai tujuan studi dan penelitian mereka.

Pasal 11. Perjanjian ini berlaku bila ditandatangani oleh kedua belah pihak. Perjanjian ini tetap berlaku selama (lima (5)) tahun sejak tanggal ditandatangani dan akan otomatis diperpanjang selama (lima (5)) tahun, kecuali salah satu pihak menyanggupi secara tertulis untuk menarik diri dari perjanjian. Pernyataan tertulis penarikan harus dilakukan paling lambat (enam (6)) bulan sebelum berakhirnya program lima (5) tahun ini.

Pasal 12. Perjanjian ini dapat dimodifikasi dengan persetujuan tertulis dari kedua belah pihak.

Pasal 13. Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan kepada pihak lain setidaknya (enam (6)) bulan sebelum tanggal efektif pengakhiran. Berakhirnya perjanjian tidak akan mempengaruhi hal kegiatan yang sedang berlangsung pada saat itu kecuali disepakati antara kedua belah pihak.

Tanggal: \_\_\_\_\_

(Tanda Tangan)  
(Nama)  
Dekan  
(Nama Fakultas / Pusat Riset)  
Chiba University

Tanggal: \_\_\_\_\_

(Tanda Tangan)  
(Nama)  
Bupati / Kadis  
(Dinas)  
(Pemerintah Kabupaten Siak)

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**LETTER OF INTENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF SIAK REGENCY, RIAU PROVINCE  
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
CHIBA UNIVERSITY, JAPAN  
ON  
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT**

*The Government of Siak Regency, Riau Province of the Republic of Indonesia and Chiba University, Japan, hereinafter referred to as "the Parties"*

*Desiring to promote friendship as well as mutual understanding and beneficial cooperation between the Parties,*

*Realizing the importance of good faith and mutual benefit principles;*

*Hereby declare their intention to establish cooperation, pursuant to the laws and regulations of their respective countries, in developing and promoting human resources capacity of Siak Regency, Riau Province of the Republic of Indonesia in the following fields:*

1. Agriculture
2. Education
3. Environment
4. Water and waste management
5. Other fields as mutually agreed in writing by the Parties



*The Parties agreed that this Letter of Intent will be followed up by the conclusion of detailed document in order to implement the cooperation at the earliest convenience.*

UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

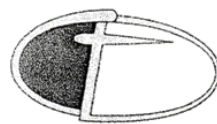
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Done in duplicate in Chiba University, Japan on November 21, 2016 in Indonesian, Japanese and English languages, all texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.*

<p><b>FOR THE GOVERNMENT OF SIAK REGENCY,</b></p> 	<p><b>FOR CHIBA UNIVERSITY</b></p> 
<p><b>Drs. H. SYAMSUAR, M.Si REGENT</b></p>	<p><b>Prof. YOSHIFUMI YASUOKA DIRECTOR of CERE CHIBA UNIVERSITY</b></p>

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang



PERNYATAAN KEHENDAK  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SIAK, PROVINSI RIAU,  
REPUBLIK INDONESIA  
DAN  
UNIVERSITAS CHIBA, JEPANG  
TENTANG  
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

LETTER OF INTENT  
BETWEEN  
THE GOVERNMENT OF SIAK REGENCY, RIAU PROVINCE OF THE  
REPUBLIC OF INDONESIA  
AND  
CHIBA UNIVERSITY, JAPAN  
ON  
HUMAN RESOURCES DEVELOPMENT

Pemerintah Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Republik Indonesia dan  
Universitas Chiba Jepang, **selanjutnya disebut "Para Pihak"**;

*The Government of Siak Regency, Riau Province of the Republic of  
Indonesia and Chiba University, Japan, hereinafter referred to as "the  
Parties"*

Berkeinginan untuk mempromosikan niat baik meningkatkan  
persahabatan dan saling pengertian serta kerjasama yang  
menguntungkan antara kedua Pihak;

*Desiring to promote friendship as well as mutual understanding and  
beneficial cooperation between the Parties,*

Menyadari pentingnya prinsip-prinsip itikad baik dan saling  
menguntungkan;

*Realizing the importance of good faith and mutual benefit principles;*

Dengan ini menyatakan niat mereka untuk membangun hubungan  
kerja sama, sesuai dengan hukum dan peraturan **yang berlaku di**  
negara masing-masing dan untuk melakukan kerjasama  
pengembangan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia  
Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Republik Indonesia dalam bidang-  
bidang berikut:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Hereby declare their intention to establish cooperation, pursuant to the laws and regulations of their respective countries, in developing and promoting human resources capacity of Siak Regency, Riau Province of the Republic of Indonesia in the following fields:*

1. Pertanian dan Perkebunan;
2. Pendidikan;
3. Lingkungan Hidup;
4. Pengelolaan Air Bersih dan Pengolahan Limbah; dan
5. Bidang lainnya yang disepakati secara tertulis oleh para Pihak.

1. Agriculture
2. Education
3. Environment
4. Water and waste management
5. Other fields as mutually agreed in writing by the Parties

Para Pihak sepakat bahwa Pernyataan Kehendak ini akan ditindaklanjuti dengan perumusan dokumen yang lebih rinci dalam rangka melaksanakan kerjasama ini dalam waktu yang tidak terlalu lama.

*The Parties agreed that this Letter of Intent will be followed up by the conclusion of detailed document in order to implement the cooperation at the earliest convenience.*

Ditandatangani dalam rangkap dua di Universitas Chiba, Jepang, pada 24 November 2016 dalam bahasa Indonesia, Jepang, dan Inggris, semua naskah memiliki keotentikan yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap Naskah Pernyataan Kehendak ini, maka naskah dalam bahasa Inggris yang akan digunakan.

*Done in duplicate in Chiba University, Japan on November 24, 2016 in Indonesian, Japanese and English languages, all texts are being equally authentic. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.*

**UNTUK PEMERINTAH KABUPATEN  
SIAK**

**UNTUK UNIVERSITAS CHIBA**

**FOR THE GOVERNMENT OF SIAK  
REGENCY,**

**FOR CHIBA UNIVERSITY**

**Drs. H. SYAMSUAR, M.Si  
BUPATI SIAK  
REGENT**

**Prof. Dr. TAKESHI TOKUHISA  
PRESIDEN UNIVERSITAS CHIBA  
PRESIDENT**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BUPATI SIAK**

Rector of Chiba University  
cc. Prof. Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, Ph.D  
Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University  
1-33, Yayoi, Inage, Chiba 263-8522 Japan  
Ph +81(0)43 290 3840 Fax +81(0)43 290 3840/3857  
<http://www2.cr.chiba-u.jp/jmrs/>

Dear Prof. Takeshi Tokuhisa,

Based on the Announcement of New Student Admissions of Chiba University, Japan for the recruitment of new students from The Regency of Siak which has listed on the Memorandum of Understanding for the development of human development of The Regency of Siak, it is hereby announced that we have prepared 5 (five) best candidates for master program and 1 (one) best candidate for doctoral program (see attach file) for continuing education at Chiba University Japan.

The best candidate for the prospective students of Chiba University has passed the stage of selection which are administrative and interview tests which have been held in collaboration with the cooperation between The Regency of Siak and Universitas Islam Riau (which is a sister university of Chiba University).

For any information, please contact **Husnul Kausarian, Ph.D** as the contact person of Regency of Siak (phone number +6285355565656, email [husnulkausarian@eng.uir.ac.id](mailto:husnulkausarian@eng.uir.ac.id)). For your assistance and cooperation, we would like to thank you.

Sincerely yours,

Drs. H. SYAMSUAR, M.Si  
Regent  
Regency of Siak

UIN SUSKA RIAU



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi pada saat mendaftar di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak, yaitu :
  - a. Biodata lengkap;
  - b. Foto copy ijazah terakhir dan transkrip nilai yang sudah dilegalisir;
  - c. IPK minimal 3.00 untuk magister (S2) dan 3.25 untuk doktor (S3);
  - d. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - e. Usia maksimal 35 (tiga puluh lima) tahun terhitung tanggal 01 April 2018;
  - f. Melampirkan sertifikat TOEFL dari lembaga resmi dengan minimal skor 500;
  - g. Pas Photo ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 (dua) lembar latar belakang merah;
  - h. Kelengkapan persyaratan disampaikan dengan map tulang biola warna kuning untuk magister (S2) dan warna hijau untuk doktor (S3);
6. Berkas kelengkapan persyaratan sudah diterima paling lambat tanggal **10 Desember 2017**;
7. Segala biaya selama mengikuti pendidikan, ditanggung oleh Beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), Beasiswa Pemerintah Jepang (monbukagakusho) atau Beasiswa Universitas Chiba Jepang;
8. Bagi yang berminat dapat menggunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya.

Untuk informasi dan komunikasi, dapat menghubungi Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Siak melalui Sdr. **R. Rafilla Irawan HP. 08127644034** dan Sdr. **Jon Kenedi HP. 085222225689**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

BUPATI SIAK,



Drs. H. SYAMSUAR, M.Si

UIN SUSKA RIAU



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## BUPATI SIAK

Nomor : 893.2/BKPSDMDI/2017/ 449  
 Lampiran : -  
 Perihal : Penerimaan Mahasiswa Baru  
 Universitas Chiba Jepang

Siak Sri Indrapura, 17 November 2017  
 Kepada Yth.:

1. Inspektur Kabupaten Siak
2. Sekretaris DPRD Kabupaten Siak
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor se- Kabupaten Siak
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Siak
5. Direktur RSUD Tengku Raff'an
6. Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Siak
7. Sekretaris KORPRI Kabupaten Siak
8. Camat se- Kabupaten Siak

di -  
 Tempat

Berdasarkan Nota Kesepahaman Bersama / Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemerintah Kabupaten Siak dengan Universitas Chiba Jepang tentang Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Siak, bersama ini disampaikan sebagai berikut :

1. Pemerintah Kabupaten Siak akan memfasilitasi dan mempersiapkan kandidat terbaik bagi putra/putri Kabupaten Siak baik PNS dan Non PNS untuk melanjutkan jenjang pendidikan Magister (S2) dan Doktor (S3) ke Universitas Chiba Jepang tahun ajaran 2018;
2. Disiplin ilmu yang dapat menjadi pilihan oleh calon mahasiswa antara lain :
  - a. Fakultas Humaniora dan Hubungan Sosial;
  - b. Fakultas Pendidikan;
  - c. Fakultas Sains;
  - d. Fakultas Teknik;
  - e. Fakultas Pertanian;
  - f. Fakultas Kedokteran;
  - g. Fakultas Farmasi;
  - h. Fakultas Keperawatan.
3. Perkuliahan dimulai pada tanggal 01 April 2018 (*spring semester*) dan 01 Oktober 2018 (*fall semester*);
4. Mengenai tentatif jadwal penerimaan mahasiswa baru di Universitas Chiba Jepang tahun ajaran 2018, silakan mengunjungi website Universitas Chiba Jepang melalui <http://www.chiba-u.ac.jp/e/admission/graduate/schedule.html>;

Komplek Perkantoran Tanjung Agung  
 Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau  
 Telepon (0764) 320744, 320723 Fax (0764) 320854, 326845, 20294  
 E-mail : santelbupatisiak@yahoo.com, Website [www.siakkab.go.id](http://www.siakkab.go.id)



## BUPATI SIAK

Rector of Chiba University  
cc. Prof. Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, Ph.D  
Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University  
1-33, Yayoi, Inage, Chiba 263-8522 Japan  
Ph +81(0)43 290 3840 Fax +81(0)43 290 3840/3857  
<http://www2.cr.chiba-u.jp/jmrs/>

Dear Prof. Takeshi Tokuhisa,

Based on the Announcement of New Student Admissions of Chiba University, Japan for the recruitment of new students from The Regency of Siak which has listed on the Memorandum of Understanding for the development of human development of The Regency of Siak, it is hereby announced that we have prepared 5 (five) best candidates for master program and 1 (one) best candidate for doctoral program (see attach file) for continuing education at Chiba University Japan.

The best candidate for the prospective students of Chiba University has passed the stage of selection which are administrative and interview tests which have been held in collaboration with the cooperation between The Regency of Siak and Universitas Islam Riau (which is a sister university of Chiba University).

For any information, please contact **Husnul Kausarian, Ph.D** as the contact person of Regency of Siak (phone number +6285355565656, email [husnulkausarian@eng.uir.ac.id](mailto:husnulkausarian@eng.uir.ac.id)). For your assistance and cooperation, we would like to thank you.

Sincerely yours,

Drs. H. SYAMSUAR, M.Si  
Regent  
Regency of Siak

UIN SUSKA RIAU

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

HASIL WAWANCARA CALON MAHASISWA PASCA SARJANA PROGRAM MAGISTER DAN DOKTORAL  
KABUPATEN SIAK KE CHIBA UNIVERSITY

No.	Nama Kandidat	Program* Magister/Doktoral	Hasil Penilaian**			Catatan
			1	2	Rata-Rata	
1.	Adrea Farandika	Magister	3	4	3,5	Perlu pengembangan riset yang spesifik dan manfaatnya buat Kabupaten Siak
2.	Ahmad Nurhajri	Magister	3,5	3	3,25	Perlu pengembangan riset yang spesifik dan manfaatnya buat Kabupaten Siak
3.	Nevi Wibella	Magister	3	3,5	3,25	Perlu pengembangan riset yang spesifik dan manfaatnya buat Kabupaten Siak
4.	Dedek Kurniawan	Magister	3,5	3	3,25	Perlu pengembangan riset yang spesifik dan manfaatnya buat Kabupaten Siak
5.	Yuliana Andini	Magister	3	3,5	3,25	Perlu pengembangan riset yang spesifik dan manfaatnya buat Kabupaten Siak
6.	Muhammad Yasin	Magister	3	3,5	3,25	Perlu pengembangan riset yang spesifik dan manfaatnya buat Kabupaten Siak
7.	Karimansyah Putra	Magister	4	4	4	Layak direkomendasikan
8.	Neli Hardianti	Magister	3	2,5	2,75	Perlu pengembangan riset yang spesifik dan manfaatnya buat Kabupaten Siak
9.	Ferdiansyah Fadil	Doktoral	3,5	3,5	3,5	Layak direkomendasikan



## © Hak cipta milik UIN Suska Riau

## State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10.	Rhomadona Adiaka Dwi Putra	Magister	4	4	4	4	Layak direkomendasikan
11.	Nurul haq	Magister	4	3,5	3,5	3,75	Layak direkomendasikan
12.	Jehan Elkausar	Magister	4	4	4	4	Layak direkomendasikan
13.	Silvana Anggraeni	Magister	3	4	3,5		Perlu pengembangan riset yang spesifik dan manfaatnya buat Kabupaten Siak
14.	Putri Juniarti Setyaningsih	Magister	3	2,5	2,75		Perlu pengembangan riset yang spesifik dan manfaatnya buat Kabupaten Siak
15.	Ulva Elviani	Magister	4	4	4	4	Layak direkomendasikan
16.	Ulva Nofriza	Magister	3	3	3	3	Perlu pengembangan riset yang spesifik dan manfaatnya buat Kabupaten Siak

\*Pilih salah satu

\*\*Rentang penilaian: Sangat Mampu (4), Mampu (3), Kurang Mampu (2), Tidak Mampu (1)

Pekanbaru, 18 Desember 2017

Mengetahui:

1. Husnul Kausarian, M.Sc, Ph.D
2. Dr. Agusnimar, M.Sc

1. ....  
2. ....

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Laporan Proses Seleksi Calon Mahasiswa Kabupaten Siak Yang Akan Melanjutkan Studi Magister dan Doktoral di Chiba University.**

**Pendahuluan**

Kegiatan seleksi wawancara terhadap calon-calon mahasiswa pasca sarjana program magister dan doktor yang berasal dari Kabupaten Siak dilaksanakan pada tanggal 16 Desember 2017 bertempat di Ruang Sidang Rektorat, Lantai 2, Universitas Islam Riau. Kegiatan ini dilaksanakan atas permintaan Kabupaten Siak melalui Surat Bupati Kabupaten Siak No. 893.2/BKPSDMD/2017/475 dan penunjukan dari Rektor Universitas Islam Riau berupa Surat Tugas dari Rektor No. 1733/A-UIR/5-2017 sebagai panitia untuk kegiatan ini.

**Tujuan**

Tim Seleksi dari Universitas Islam Riau yang terdiri dari Husnul Kausarian, M.Sc, Ph.D dan Dr. Agusnimar, M.Sc ditunjuk oleh Bupati Siak dan Rektor UIR untuk melaksanakan proses seleksi wawancara terhadap calon mahasiswa yang akan berangkat ke Chiba University Jepang. Pelaksanaan tes wawancara ini dilandasi oleh pemikiran bahwa setiap kandidat yang akan dikirim, memiliki performa yang baik agar bisa memenuhi permintaan dari persyaratan yang diajukan oleh Chiba University. Yang kedua, pelaksanaan wawancara terhadap calon-calon mahasiswa pasca sarjana asal Kabupaten Siak yang akan melanjutkan studi di Chiba University ini tidak menjadi acuan dasar sebagai patokan kepastian / jaminan kelulusan, karena keputusan final akan diberikan oleh pihak Chiba University berdasarkan hasil penjurian / seleksi yang dilakukan oleh Chiba University.

Pekanbaru, 18 Desember 2017

Disediakan oleh:

1. Husnul Kausarian, M.Sc, Ph.D
2. Dr. Agusnimar, M.Sc

1.  2. 

UIN SUSKA RIAU



**PEMERINTAH KABUPATEN SIAK**  
**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIAK**

Komplek Perkantoran Tanjung Agung  
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau  
Telepon (0764) 20244, 20200 Faks. (0764) 320845, 320854  
E-mail:santelbupatisiak@yahoo.com, Website:www.kabsiak.go.id

**PENGUMUMAN**

Nomor : 422.1/Pengumuman/BKPSDMD/2017/490

**TENTANG**

**HASIL SELEKSI PENERIMAAN MAHASISWA BARU**  
**UNIVERSITAS CHIBA JEPANG TAHUN AJARAN 2018**

Berdasarkan hasil seleksi yang telah dilakukan oleh Tim Seleksi Universitas Islam Riau yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 16 Desember 2017 bertempat di Ruang Rapat Rektorat Universitas Islam Riau, dengan ini diumumkan calon mahasiswa yang layak direkomendasikan untuk melanjutkan pendidikan ke Universitas Chiba Jepang Tahun Ajaran 2018, sebagai berikut :

**A. Program Magister**

1. Jehan Elkausar, ST
2. Karimansyah Putra, ST
3. Nurul Haq, S.IP
4. Ns. Rhomadona Adiaka Dwi Putra, S.Kep
5. Ulva Elviani, S.Kom

**B. Program Doktorat**

1. Ferdiansyah Fadil, ST., M.Si

Demikian disampaikan, untuk dimaklumi.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura  
Pada tanggal 22 Desember 2017

a.n. BUPATI SIAK  
SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. H. T. S. HAMZAH**  
Kepala Utama Madya  
NIP. 19600125 198903 1 004

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LIST OF BEST CANDIDATES BASED ON ADMINISTRATIVE AND  
INTERVIEW TESTS FOR MASTER & DOCTORAL PROGRAM  
IN CHIBA UNIVERSITY JAPAN FROM REGENCY OF SIAK


A. Master Program

1. Jehan Elkausar, ST
2. Karimansyah Putra, ST
3. Nurul Haq, S.IP
4. Ns. Rhomadona Adiaka Dwi Putra, S.Kep
5. Ulva Elviani, S.Kom

B. Doctoral Program

1. Ferdiansyah Fadil, ST., M.Si

REGENT  
REGENCY OF SIAK

  
Drs. H. SYAMSUAR, M.Si

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



CHIBA UNIVERSITY

Chiba University  
1-33 Yayoicho, Inage-ku, Chiba  
263-8522, JAPAN  
TEL: +81-43-290-3261

2nd July 2018

Dear Ms. Ulva Elviani,

Invitation Letter

We hereby invite you to take the entrance exam of Graduate school of Science and Engineering, Chiba University, which will be held in Chiba, Japan, 7<sup>th</sup> July and 16<sup>th</sup> August 2018.

Looking forward to seeing you at Chiba University.

Best Regards,

*Yoshitsugu Manabe*

Prof. Yoshitsugu Manabe

Graduate school of Science and Engineering,  
Chiba University

真鍋佳祐



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**BUPATI SIAK**

Siak Sri Indrapura, 28671  
Regency of Siak  
Riau Province, Indonesia  
18<sup>th</sup> July 2018

Rector of Chiba University  
cc. Prof. Josaphat Tetuko Sri Sumantyo, Ph.D  
Center for Environmental Remote Sensing, Chiba University  
1-33, Yayoi, Inage, Chiba 263-8522 Japan  
Ph +81(0)43 290 3840 Fax +81(0)43 290 3840/3857  
<http://www2.cr.chiba-u.jp/jmrsl/>

Dear Prof. Takesi Tokuhisa,

Based on invitation letter from Prof. Yositsugu Manabe from Graduate School of Science and Engineering for Mrs. ULVA ELVIANI, S.Kom on 2<sup>nd</sup> July 2018 about the invite to take the entrance of Graduate School of Science and Engineering, Chiba University, which will be held in Chiba, Japan, 22<sup>th</sup> July and 16<sup>th</sup> August 2018. Hereby we declare that she is one of best candidates for prospective new student from Regency of Siak which has listed on the Memorandum of Understanding between The Government of Siak Regency and Chiba University.

In connection with that matter, I declare that Mrs. ULVA ELVIANI, S.Kom will fulfill the invitation of Chiba University entrance examination that match to the specified schedule. Hopefully the candidate that we send can be accepted as a student of Chiba University.

For your assistance and cooperation, we would like to thank you.

Sincerely yours,

SYAMSUAR  
Regent  
Regency of Siak  
Riau Province, Indonesia

Komplek Perkantoran Tanjung Agung  
Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau  
Telepon (0764) 320744, 320723 Fax (0764) 320854, 320845, 20294  
E-mail : santelbupatisiak@yahoo.com. Website www.siakkab.go.id



# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**招へい理由書**

平成30年7月3日

在 インドネシア 日本国 大使 殿  
総領事

**招へい人**  
(招へい人と身元保証人が同一人の場合には「省略」と記入し、本欄への記入・押印を省略して差し支えありません。)

住 所 : 〒263 - 0012  
千葉県千葉市稲毛区佐台町332番地5

氏 名 : (注) 眞鍋佳嗣

電 話 番 号 : (043) 216 - 4187 (内線)

F A X 番 号 : (043) 216 - 4187

【以下は、会社・団体が招へいする場合に記入してください】

担当者所属先名 :  
担 当 者 氏 名 :  
担当者電話番号 : ( ) - (内線)  
F A X 番 号 : ( ) -

**査証申請人**  
(氏名は必ず旅券上のアルファベット表記で記載してください。申請人が複数の場合には代表者の身分事項を下記に記入の上、申請人全員のリストを作成し、添付してください。)

国 籍 : Indonesia  
職 業 : Parttime job as lecture asistence  
氏 名 : Ulva Elviani (男・女) ほか 0 名  
生 年 月 日 : 西暦 1995 年 11 月 3 日生 22 歳

上記の者の招へい目的等は次のとおりです。  
(1) 及び (2) については、今回招へいするに至った目的、経緯の詳細について記入してください。  
(本欄に記入しきれない場合は、「別紙のとおり」と記入し、別紙を作成してください。)

(1) 招へい目的  
✓ 2018年7月22日および8月16日行われる千葉大学大学院融合理工学府の博士前期課程  
の人試の受験のため。

(2) 招へい経緯  
2018年2月に、インドネシアで奨学金の申請を行い採択されるということで、千葉大学  
でARについての勉強研究をしたいという連絡があり、受験を許可した。

(3) 申請人との関係  
申請者が入学試験に合格した際の受け入れ教員

(注) 会社・団体等が招へいする場合 : 会社・団体名及び役職名を記入の上、代表者印、役職印又は社印を押印してくだ  
さい(私印不可)。押印が困難な場合は所属機関の然るべき役職の方が署名して  
ください。

外国籍者等で印鑑がない場合 : 署名してください。

# Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**身元保証書**

平成 30 年 7 月 3 日

在 インドネシア 日本国 大使 殿  
総領事

**査証申請人**

(氏名は必ず旅券上のアルファベット表記で記載してください。申請人が複数の場合には代表者の身分事項を下記に記入の上、申請人全員のリストを作成し、添付してください。)

国 籍 : Indonesia  
職 業 : Partime job as lecture asistence  
氏 名 : Ulva Elviani (男) ほか 0 名  
生 年 月 日 : 西暦 1995 年 11 月 3 日生 22 歳

上記の者の本邦入国に関し、下記の事項について保証します。

- 滞在費
- 帰国旅費
- 法令の遵守

上記のとおり相違ありません。

**身元保証人**

住 所 : 〒 263 - 0012  
千葉県千葉市稲毛区萩台町332番地5  
職 業 : 千葉大学 教授  
氏 名 : (注) 眞鍋佳嗣  
生 年 月 日 : 西暦 1969 年 1 月 9 日生 49 歳  
電 話 番 号 : (043) 216 - 4187 (内線)  
F A X 番 号 : (043) 216 - 1187  
申請人との関係 : 申請者の受け入れ予定教員

[以下は、会社・団体が招へいする場合に記入してください]

担当者所属先名 :  
担 当 者 氏 名 :  
担当者電話番号 : ( ) - (内線)  
F A X 番 号 : ( ) -

(注) 会社・団体等が招へいする場合 : 会社・団体名及び役職名を記入の上、代表者印、役職印又は社印を押印してください(私印不可)。押印が困難な場合は所属機関の然るべき役職の方が署名してください。

外国籍者等で印鑑がない場合 : 署名してください。

UIN SUSKA RIAU

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

フォームを印刷

### List of Visa Applicants

\* Be sure to write the name in the Latin alphabet as it appears on his/her passport.

\* Fill out the "relationship with the inviting person and guarantor" field if the purpose of the invitation is "Visit to relatives/acquaintances."

1. Visa applicant (representative applicant)  
 Nationality: Indonesia  
 Occupation: Parttime job as lecture asistence in subject data  
 Full name: Ulva Elviani (Male or Female)  
 Date of birth: 1995 / 11 / 3 (Age: 22 )  
 (Year) / (Month) / (Day)  
 Relationship with the inviting person and guarantor:
2. Visa applicant  
 Nationality:  
 Occupation:  
 Full name: (Male or Female)  
 Date of birth: / / (Age: )  
 (Year) / (Month) / (Day)  
 Relationship with the inviting person and guarantor:
3. Visa applicant  
 Nationality:  
 Occupation:  
 Full name: (Male or Female)  
 Date of birth: / / (Age: )  
 (Year) / (Month) / (Day)  
 Relationship with the inviting person and guarantor:
4. Visa applicant  
 Nationality:  
 Occupation:  
 Full name: (Male or Female)  
 Date of birth: / / (Age: )  
 (Year) / (Month) / (Day)  
 Relationship with the inviting person and guarantor:
5. Visa applicant  
 Nationality:  
 Occupation:  
 Full name: (Male or Female)  
 Date of birth: / / (Age: )  
 (Year) / (Month) / (Day)  
 Relationship with the inviting person and guarantor:







## RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama lengkap penulis yaitu Tengku Yulmida lahir di Rimba Melintang, pada Tanggal 02 Juli 1997, merupakan anak ke-2 dari 4 bersaudara dari pasangan Bapak Tengku Sulaiman dan Ibu Syarifah Khairani. Penulis Berkebangsaan Indonesia dan beragama islam. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di MI (Madrasah Ibtidaiyah) Hubbul Wathan Rimba Melintang Negeri 011 Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar, pada tahun 2003. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusako selesai pada tahun 2015. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Rimba Melintang Kecamatan Rimba Melintang Kabupaten Rokan Hilir selesai pada tahun 2015. Selama di SMA penulis aktif di berbagai kegiatan internal dan eksternal sekolah. Pada masa Penulis juga pernah menjabat sebagai Ketua Osis aktif pada tahun 2016 sekaligus menjabat sebagai sekretaris umum Rohis sekolah. Pada tahun yang sama pula, pada tahun 2015 melalui jalur PBUD jalur undangan, penulis diterima di jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Selama masa jenjang bangku perkuliahan penulis aktif dalam berbagai kegiatan organisasi kampus, baik itu organisasi internal maupun eksternal. Pada tahun 2015 penulis bergabung dalam organisasi Rohis ISC Al-Iqtishodi dan menjadi anggota aktif sampai tahun 2019. Selain itu, pada tahun 2016 penulis juga aktif dalam organisasi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) tepatnya menjadi staff dalam bidang Kaderisasi, pada tahun 2018 penulis juga bergabung dalam BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) tingkat Universitas dan bergabung dalam Kementerian Koordinasi Politik Pergerakan, tepat dalam Kementerian Jaringan Eksternal, tepatnya pada posisi Bendahara Kementerian. Pada bulan Januari tahun 2017 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Pekanbaru, pada Juli sampai dengan September 2018 penulis melakukan Kuliah Kerja nyata (KKN) di Desa Lestari Bathin Sobanga Kecamatan Bathin Solapan, Duri XIII Kabupaten Bengkalis.

Pada tanggal 20 Desember 2019 penulis dinyatakan lulus sebagai sarjana dengan judul skripsi “ Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dibidang Pendidikan (Study Kasus: Kebijakan Luar Negeri Beasiswa di Chiba University)” dibawah bimbingan ibu Irdayanti S.IP, MA.

Melalui jalur SNMPTN Undangan, penulis di terima di Jurusan Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pada bulan Januari tahun 2016 penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan di Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar, pada bulan Juli sampai dengan September tahun 2016 penulis melakukan Kuliah Kerja Nyata di Desa Binamang Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar.

Pada tanggal 10 Januari 2017 penulis dinyatakan lulus sebagai Sarjana dengan judul Skripsi “Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah di Desa Koto Tuo Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar” dibawah bimbingan Bapak Candra Jon Asmara S.Sos, M.Si.